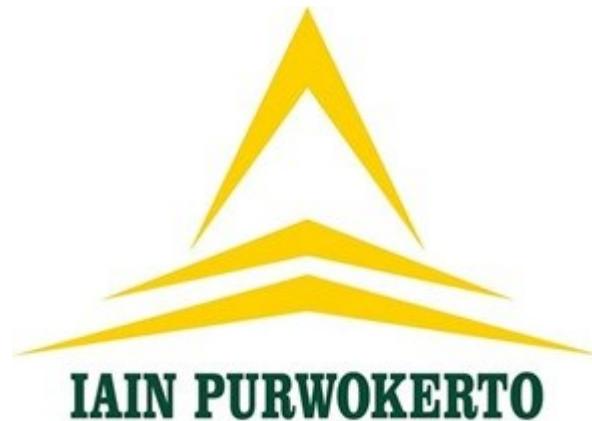


**KEBIJAKAN PROGRAM PESANTRENISASI
DI IAIN PURWOKERTO**



TESIS

**Disusun dan Diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**LATIFATUL MAWADDAH
1717652009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

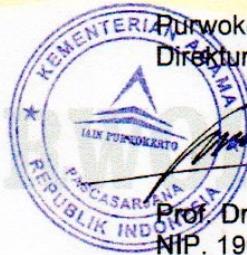
PENGESAHAN

Nomor: 065/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Latifatul Mawaddah
NIM : 1717652009
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto

Telah disidangkan pada tanggal **28 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Pendidikan (M.Pd.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 26 Februari 2021
Direktur,

(Signature)
Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Latifatul Mawaddah
NIM : 1717652009
Program Studi : MPI
Judul Tesis : Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof.Dr. Fauzi, M.Ag. NIP.19740805 199803 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		25 February 2021
2	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		25 February 2021
3	Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. NIP.19680816 199403 1 004 Pembimbing/ Penguji		25 February 2021
4	Dr. H. Rohmad, M.Pd. NIP. 19661222 199103 1 002 Penguji Utama		25 February 2021
5	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Penguji Utama		25 February 2021

Purwokerto, 25 February 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.

NIP. 19720420 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa :

Nama : Latifatul Mawaddah
NIM : 1717652009
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Tesis : Manajemen Mutu Pendidikan Melalui Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih banyak.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 13 November 2020
Pembimbing,



Dr. K.H. Mub. Rogib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “ Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto “ seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun dalam bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, etika, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian besar tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 13 November 2020
Hormat Saya,



Latifatul Mawaddah

KEBIJAKAN PROGRAM PESANTRENISASI DI IAIN PURWOKERTO

Latifatul Mawaddah

1717652009

ABSTRAK

Manusia yang unggul adalah hasil dari sebuah proses pendidikan yang unggul pula atau bermutu. Dalam hal ini pemerintah melalui berbagai kebijakan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu bagi segenap bangsa Indonesia. Perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila lembaga tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan meliputi kebutuhan kemasyarakatan, kebutuhan dunia kerja, dan kebutuhan professional. IAIN Purwokerto sebagai perguruan tinggi yang sudah dikenal masyarakat dengan keislamannya menerapkan standarisasi minimal Kemampuan Baca Tulis al-Qur'an dan Pengetahuan Pengamalan ibadah atau yang disebut dengan Standar BTA/PPI. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto.

Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Data utama diperoleh dari Lembaga Ma'had IAIN Purwokerto, sedangkan untuk informan triangulasi berjumlah empat orang yang terlibat dalam program pesantrenisasi yaitu Mudzir Ma'had IAIN Purwokerto, Rektor IAIN Purwokerto, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah dan Admin SIMA. Analisis yang digunakan menggunakan konsep Miles dan Huberman yang meliputi *data reduction, data display dan conclusion*.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto bertujuan untuk mempertahankan kualitas mahasiswa IAIN Purwokerto, ketika sudah terjun di masyarakat dapat mempertahankan eksistensi dari ciri khas IAIN Purwokerto sendiri yang tidak meninggalkan keilmuan bidang agama yang bersumber dari alqur'an dan hadist. Program pesantrenisasi merupakan program wajib bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian BTA-PPI pada saat ujian pertama masuk (*pre-test*) dan diuji lagi setelah mengikuti program (*post-test*). Dalam mempermudah menjalani program tersebut, pihak IAIN Purwokerto menyediakan beberapa pesantren mitra untuk ditinggal (*mondok*) selama 1 tahun supaya dapat dibimbing langsung oleh pengasuh pesantren dan staff-staff bimbingan khusus Baca Tulis al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah (BTA-PPI). Kebijakan program pesantrenisasi memiliki implikasi akademik. *Pertama*, sertifikat kelulusannya menjadi syarat mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh jurusan. *Kedua*, sertifikat kelulusan juga menjadi syarat untuk mengikuti PPL, KKN, Ujian Komprehensif dan Munaqosyah dan pesantren sendiri dapat membawa positif bagi mahasiswa karean dapat menambah keilmuan, mendapatkan banyak pengetahuan yang belum pernah didapat sebelumnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Program Pesantrenisasi, IAIN Purwokerto

THE POLICY PESANTRENISASI PROGRAM AT IAIN PURWOKERTO

Latifatul Mawaddah

1717652009

ABSTRACT

A superior human being is the result of a superior or quality education process. Education is a determinant of competitive advantage, a determinant of the direction of success. In this case, the government through various policies has made various efforts to create quality education for all Indonesians. Higher education is considered qualified if the institution is able to determine and realize its vision through the implementation of its mission, and is able to meet customer needs including social needs, world needs, and professional needs. IAIN Purwokerto as a university that is well known to the public for its Islamic quality will be of low quality if graduates from IAIN Purwokerto have not mastered the field of religion. Therefore, IAIN Purwokerto applies a minimum standardization of the ability to read al-Qur'an and Knowledge of the practice of worship, or what is called the BTA / PPI Standards. This qualitative research aims to describe and analyze the education quality management policy through the rethensation program at IAIN Purwokerto.

Methods of data collection by interview, documentation and observation. The main data were obtained from the Ma'had IAIN Purwokerto Institute, while for the triangulation informants there were four people involved in the pesantrenisasi program, namely Mudzir Ma'had IAIN Purwokerto, Chancellor of IAIN Purwokerto, Caregivers of Darul Falah Islamic Boarding School and Admin SIMA. The analysis used uses the concept of Miles and Huberman which includes *data reduction, data display and conclusion*.

Based on the results of the study, it was found that the Pesantrenisasi Program Policy at IAIN Purwokerto aims to maintain the quality of IAIN Purwokerto students, when they are already involved in society, they can maintain the existence of the characteristics of IAIN Purwokerto itself which do not leave the scientific field of religion which comes from the Qur'an and hadith. The pesantrenisasi program is a compulsory program for students who do not pass the BTA-PPI exam at the time of the first entrance exam (pre-test) and are tested again after participating in the program (post-test). In making it easier to undergo the program, IAIN Purwokerto provides several partner pesantren to be left behind (mondok) for 1 year so that they can be directly mentored by pesantren caregivers and special guidance staff for Reading and Writing the Qur'an and Practicing Worship Practices . The pesantrenisasi program policy has academic implications. First, the graduation certificate becomes a requirement for certain courses determined by the department. Second, a graduation certificate is also a requirement for taking PPL, KKN, Comprehensive and Munaqosyah Examinations and Islamic boarding schools themselves can bring positivity to students because they can knowledge, a lot of knowledge that has never been obtained before.

Keywords: The Policy, Pesantrenisasi Program, IAIN Purwokerto

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Şad	s/	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	d/	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t/	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z/	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
فا	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddh* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>Kara>mah al-auliya></i>
---------------	---------	----------------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭ* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka>t al-fit}r</i>
------------	---------	---------------------------

4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ja>hiliyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>tansa></i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd}</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qura>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama></i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Z awi> al-furūd}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا



PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua Saya, Bapak Ngadimin dan Ibu Siti Fatimah yang mendukung saya baik secara moril, materil dan doa yang selalu mengalir dengan, tulus dan ikhlas.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, dengan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW keuarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan petunjuk dari Allah SWT semata sehingga tesis yang berjudul “Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto” terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari semua pihak. Maka dari itu saya pada kesempatan ini dengan penuh hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya ata bantuan, bimbingan dan dukungan kepada :

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan juga pembimbing tesis yang telah memberi segala bimbingan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan penulis, selama kuliah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof. Dr. H.Sunhaji, M. Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang elah memberi bantuan dan bimbingan terkait dengan administrasi maupun akademis.
3. Dr. Rohmat, M.Ag., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Kholid Mawardi, S. Ag, M.Hum., Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan bimbingan akademis selama pada kuliah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff UPT Pengembangan Bahasa IAIN Purwokerto yang telah banyak membantu penulis dalam pemenuhan persyaratan ujian.
7. Kepala Ma’had IAIN purwokerto beserta seluruh jajarannya yang telah membantu selama penelitian ini berlangsung.

8. Keluarga kakak saya Siti Khoiriyah ,Kartono dan Maila Faiza Rizqi yang selalu mensupport dalam kondisi apapun.
9. Ayah Dr. Supani, M.A dan Bunda Enung Asmaya, M.A, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat sekaligus sebagai Orang Tua Kedua saya.
10. Semua rekan-rekan seperjuangan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan Tahun 2017 yang telah banyak mentransfer ilmu dan pengalamannya.
11. Semua teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat yang telah menemani saya.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi meningkatkan pengetahuan.

Atas segala bantuannya, penulis ucapkan *Jazakumullah khairan kasir wa jazakumullah ahsan al-jaza* dan penulis panjatkan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak , khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 13 November 2020

Penulis,



Latifatul Mawaddah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	vii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KEBIJAKAN PROGRAM PESANTRENISASI	
A. Kebijakan Pendidikan	12
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan	12
2. Batasan Kebijakan Pendidikan.....	14
3. Karakteristik Kebijakan Pendidikan.....	15
4. Cakupan Kebijakan Pendidikan	16

	5. Pendekatan Kebijakan Pendidikan	17
	6. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan	18
	B. Program Pesantrenisasi	19
	1. Sejarah Pesantren	19
	2. Pengertian Pesantren	21
	3. Fungsi dan Tujuan Pesantren	23
	4. Kurikulum Pesantren.....	26
	C. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	29
	D. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian	35
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
	C. Subjek dan Obyek Penelitian	37
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	KEBIJAKAN PROGRAM PESANTRENISASI DI IAIN PURWOKERTO	
	A. Kebijakan program pesantrenisasi	40
	B. Komitmen Pimpinan terhadap program pesantrenisasi.....	44
	C. Peran lembaga Ma'had terhadap program pesantrenisasi.....	52
	D. Analisis Kebijakan Prrogram Pesantrenisasi.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	82

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 : Pedoman Observasi

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Mudzir Ma'had IAIN Purwokerto

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul
Falih Kedungwuluh

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara dengan Admin SIMA Pondok Pesantren Darul Falah

Lampiran 6 : Kesepakatan Bersama (**Memorandum Of Understanding / MoU**) IAIN Purwokerto

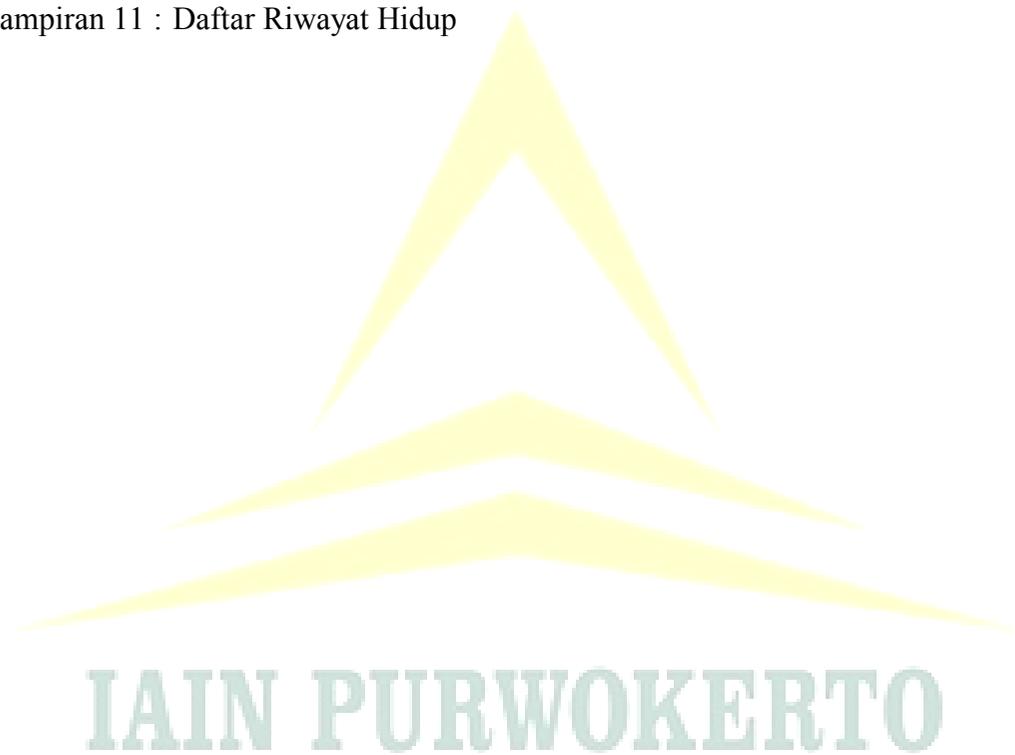
Lampiran 7 : Dokumentasi Kegiatan Pendukung Pesantrenisasi

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

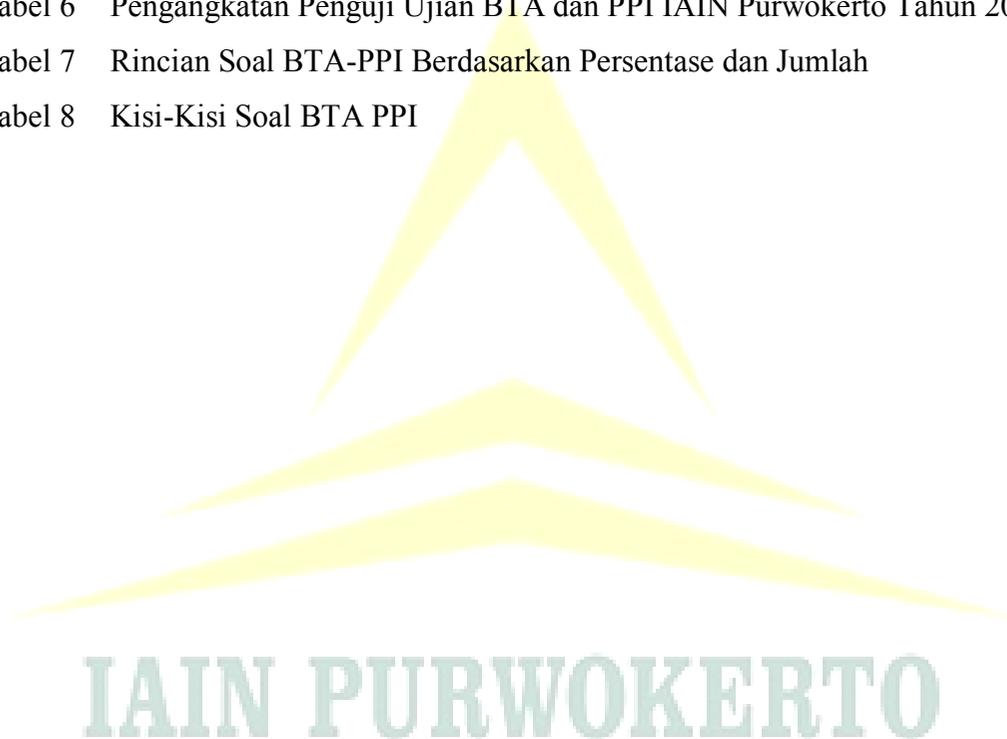
Lampiran 10 : SK Pembimbing Tesis

Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Input Mahasiswa Baru IAIN Purwokerto 3 (Tiga) Tahun Terakhir
- Tabel 2 Waktu Pelaksanaan Penelitian
- Tabel 3 Data Pesantren Mitra IAIN Purwokerto
- Tabel 4 Rincian Materi Pembelajaran di Pesantren Mitra IAIN Purwokerto
- Tabel 5 Biaya Pelaksanaan Ujian Mahasiswa Baru IAIN Purwokerto yang dibebankan kepada PNB
- Tabel 6 Pengangkatan Penguji Ujian BTA dan PPI IAIN Purwokerto Tahun 2019
- Tabel 7 Rincian Soal BTA-PPI Berdasarkan Persentase dan Jumlah
- Tabel 8 Kisi-Kisi Soal BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

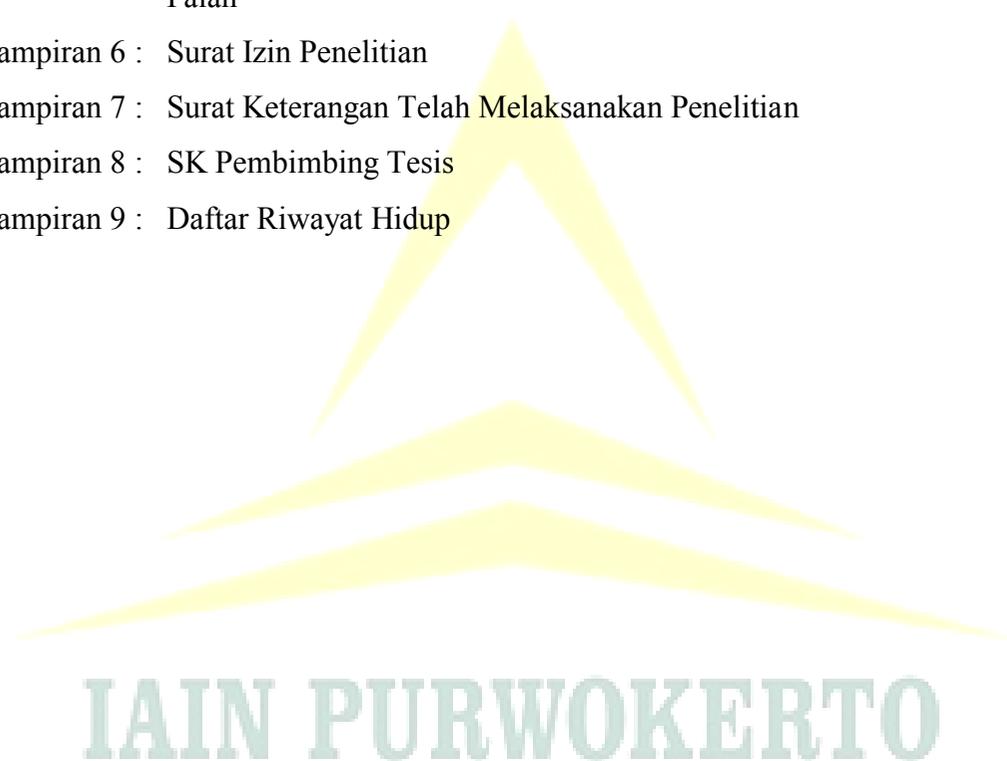
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsep Trilogi Juran



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Observasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Mudzir Ma'had IAIN Purwokerto
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara dengan Admin SIMA Pondok Pesantren Darul Falah
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 8 : SK Pembimbing Tesis
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

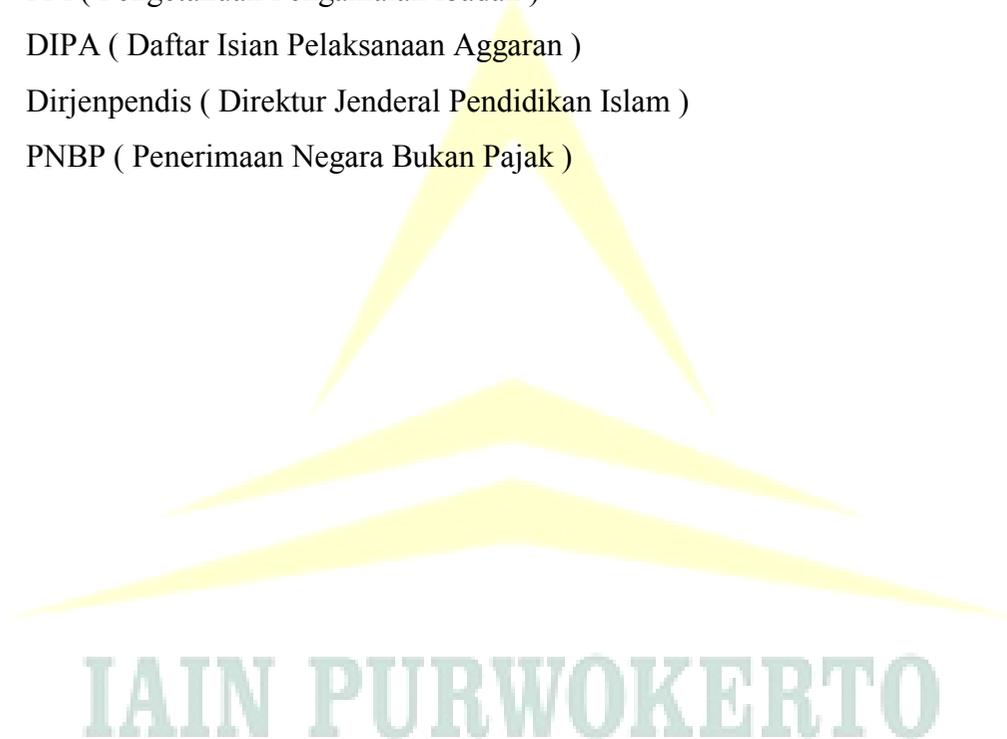


IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN (AKRONIM)

Daftar singkatan dan akronim ini ditulis dengan tujuan menyatukan persepsi antar penulis dan pembaca tentang berbagai singkatan dan akronim yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun daftar singkatan dan akronim yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. IAIN (Institut Agama Islam Purwokerto)
2. BTA (Baca Tulis Al-Qur'an)
3. PPI (Pengetahuan Pengamalan Ibadah)
4. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
5. Dirjenpendis (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
6. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita maklumi, bahwa manusia adalah makhluk social (*al-insanu madaniyyun bi at- thab'I*) atau zoon politicon, oleh karenanya, setiap manusia akan saling memerlukan dalam memenuhi kebutuhannya. Antara sesama manusia juga dituntut untuk saling bekerja sama, saling menghargai dan menghormati untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Adanya alasan social (*social reason*) di atas menjadi salah satu pendorong bagi manusia untuk membentuk suatu perkumpulan yang bisa disebut “organisasi”. Organisasi ini amat dibutuhkan untuk mewujudkan setiap cita-cita yang disepakati oleh anggota organisasi secara bersama. Oleh karena itu, organisasi tumbuh dan berkembang begitu pesat di tengah-tengah masyarakat. Organisasi dibentuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti, pemerintahan, perusahaan, politik, hukum, ekonomi termasuk bidang pendidikan.¹

Pendidikan sebagai sebuah organisasi memiliki kekhasan tersendiri jika dibanding lainnya, misalnya perusahaan, atau pemerintahan. Kekhususan pendidikan sebagai sebuah organisasi, bahan masukannya adalah berupa orang/manusia (siswa atau murid). Ketika siswa ini telah menjalani sejumlah proses (yang kita kenal dengan nama proses pembelajaran), maka secara fisik out put yang dihasilkan tetap sama yaitu berupa manusia pula (tidak akan berubah menjadi benda/ makhluk yang lain). Sementara bidang garap pendidikan/ sekolah sebagai sebuah organisasi adalah kurikulum, siswa, pegawai, guru, keuangan, sarana dan prasarana, humas atau informasi. Jika ending dari semua proses dalam sebuah perusahaan adalah produk barang jadi (siap pakai), maka pendidikan endingnya adalah alumni pendidikan/lulusan.²

¹Muh. Hizbul Muflihin, *Administrasi Pendidikan Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru dan Pimpinan Sekolah* (Yogyakarta :Pilar Media, 2013), 18

² Muh. Hizbul Muflihin, *Administrasi Pendidikan Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru dan Pimpinan Sekolah* (Yogyakarta :Pilar Media, 2013), 21

Pendidikan merupakan pilar penting bagi negara sebagai wadah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Peningkatan suatu kualitas sumber daya manusia harus diatur dengan sistem yang baik, mempunyai arah dan fokus pada kepentingan-kepentingan memberdayakan ilmu pengetahuan yang didasari oleh iman dan takwa yang ada pada program-program sekolah/lembaga.³ Sebuah lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi persoalan mutu pada pendidikan tinggi menjadi penting untuk dijadikan satu kajian khusus dalam upaya perbaikan pendidikan yang akan berdampak para pembangunan Indonesia di berbagai bidang, karena di pendidikan tinggi inilah para peletak pembuat kebijakan, ilmuwan, seniman, dan para perekayasa teknologi seharusnya lahir dengan tidak melulu mementingkan kepintaran, tetapi lebih dari itu pembangunan karakter generasi penerus bangsa ke depan.⁴

Peningkatan mutu merupakan elemen krusial dalam manajemen mutu, sebab mutu bukan sesuatu hal yang stagnan namun dinamis sesuai dengan tuntutan atau harapan pelanggan, dan harapan pelanggan akan berubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Konsep dasar dari peningkatan mutu adalah sebuah konsep yang terdiri dari pengukuran kunci mutu, dan melakukan tindakan untuk meningkatkannya. Peningkatan mutu tidak dapat dilepaskan dari pengukuran mutu serta harapan pelanggan, sebab melalui pengukuran tersebut dapat diketahui apakah mutu produk atau layanan telah memenuhi atau bahkan melebihi kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebab mutu dalam makna sederhana adalah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Perguruan tinggi perlu terus melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan, sebab perguruan tinggi bekerja dalam wilayah yang kompetitif baik dari sisi lembaga maupun lulusannya. Dimana lulusan perguruan tinggi akan menentukan daya saing suatu bangsa di kancah persaingan global. Tanpa adanya kemampuan mengadopsi perkembangan-perkembangan mutakhir dalam konsep pengelolaan perguruan

³ Qoimah, *Membangun Pelayanan Publik Yang Prima : Strategi Manajemen Humas Dalam Penyampaian Program Unggulan di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Islamic Management, Vol :01/No: 02, 192

⁴ Faridah Alawiyah, *Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Aspirasi Vol 2 No 1 Juni 2011, 65

tinggi, output (lulusan) PT akan sulit untuk terjun dalam persaingan global (dalam pasar kerja dunia).⁵

Perguruan Tinggi merupakan lembaga penyedia jasa layanan masyarakat di bidang pendidikan. Jasa layanan itu sering dinyatakan (dalam bentuk janji) kepada masyarakat untuk diterima dan didukung. Kelangsungan hidup perguruan tinggi tidak bisa lepas dari masyarakat pendukung maupun masyarakat yang berkepentingan dengannya (stakeholder). Masyarakatlah yang memberi masukan sumber daya dan dana yang diperlukan bagi penyelenggaraannya, dan masyarakat pula yang nantinya akan menerima atau memanfaatkan hasil pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Karena itu wajar dimintai tuntutan tanggung jawab, tanggung jawab itu dinyatakan sebagai akuntabilitas perguruan tinggi, yang mengharuskan memberikan penjaminan mutu (quality assurance).⁶

Manajemen mutu total dapat dilihat sebagai pendekatan utama untuk mendapatkan kepuasan Konsumen (Mahasiswa) dan keuntungan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus memahami bagaimana konsumen membutuhkan kualitas dan prestasi yang diharapkan konsumen. Perguruan Tinggi harus berusaha menawarkan kualitas lebih baik dari pada saingannya. Custom Research Incorporate (CRI) di Amerika Serikat menggunakan kriteria Baldrige untuk dapat meningkatkan kualitas dari suatu produk, berlaku untuk jasa pendidikan yaitu : Menjalankan strategi yang berpusat pada membangun hubungan dekat dengan Konsumen (Mahasiswa), Diorganisasi berdasarkan tim antar divisi yang berpusat pada konsumen, Mengembangkan proses dan prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengukur hasilnya, Bertanya pada konsumen secara eksplisit apa yang mereka harapkan dari hubungan kemitraan, Mencari Umpan Balik dari konsumen tentang masing- masing produk jasa pendidikan maupun hubungan keseluruhan, Memperkerjakan orang-orang terbaik dan menanam modal dalam pengembangan diri mereka, Tetap fleksibel, gesit, cepat bergerak dan memberi

⁵ Andi Arif Rifa'I, *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Suistanable Vol. 1 No. 1 (2018), 29-30

⁶ Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia Suatu Analisis Kebijakan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), 5

wewenang pada semua untuk “bertindak saja”, pemberian biaya pendidikan yang terjangkau, terus membangun mutu, dan tidak pernah puas.⁷

Pendidikan tinggi dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kualitasnya melalui empat hal yaitu : siswa merasa puas dengan layanan pendidikan tinggi, pelanggan pendidikan puas dengan layanan kepada siswanya, pemegang saham merasa puas memiliki lulusan berkualitas tinggi dan memenuhi ekspektasi, dosen dan staf puas dengan layanan pendidikan tinggi di beberapa bidang : pembagian kerja, hubungan dan komunikasi antara dosen/ pemimpin, karyawan, gaji/ honor yang diterima layanan.⁸

Banyak factor yang menentukan mutu pendidikan, maka dalam pengembangan diperlukan strategi tertentu. Ada beberapa strategi atau kebijakan yang mungkin dikembangkan, yaitu : 1) Perbaikan terus menerus (*continues improvement*). Strategi ini menuntut pihak pengelola pendidikan untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Strategi ini senantiasa memperbarui proses pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Apabila tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola pendidikan dengan sendirinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelanggan tersebut. 2) Menentukan standar mutu (*quality assurance*). Strategi ini menuntut pihak pengelola pendidikan menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen pendidikan, seperti standar input, guru/dosen, proses pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana, evaluasi pendidikan dan sebagainya. 3) Perubahan kultur (*change of culture*). Strategi ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadi mutu sebagai orientasi semua komponen pendidikan. Jika strategi ini ditetapkan dalam pengelolaan pendidikan, maka pimpinan harus membangun kesadaran semua komponen yang terlibat, seperti Kepala Sekolah, yayasan, guru, karyawan, siswa, orangtua, dan berbagai unsur yang terkait. 4) Mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the customer*). Salah satu keberhasilan pendidikan adalah bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk itu mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Antara pengelola pendidikan dan pelanggan

⁷ Eddy Soeryanto Soegoto, *Menciptakan Strategi Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), 39

⁸Siti Rabiah, *Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Sinar Manajemen, Vol 6, No: 1(2019), 58

harus terus menerus tukar menukar informasi, agar senantiasa dapat melakukan perubahan-perubahan dan improvisasi yang diperlukan.⁹

Teori manajemen mutu pendidikan pada tesis ini dilandaskan dengan teori manajemen mutu total yang digagas oleh Juran, yaitu perencanaan mutu, pelaksanaan mutu yang bersifat pengendalian, dan evaluasi yang bersifat peningkatan. Trilogi Juran merupakan penyempurnaan dari fungsi-fungsi manajemen yang dikembangkan oleh manajemen ilmiah. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk perencanaan mutu menurut Juran adalah menentukan siapa yang menjadi pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan, mengembangkan produk dengan keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, mengembangkan system proses yang memungkinkan organisasi untuk menghasilkan keistimewaan tersebut, menyebarkan rencana kepada level operasional.¹⁰

IAIN Purwokerto merupakan pengembangan dan alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014 tentang perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto. Perubahan status STAIN menjadi IAIN Purwokerto memberi otonom dan peluang yang banyak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki IAIN Purwokerto sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi civitas akademika dengan membuka Jurusan dan Program Studi baru serta melakukan penyempurnaan kurikulum dan reformasi berbagai aspek. Pengembangan IAIN Purwokerto dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagai klien utamanya. Layanan akan dianggap meningkat apabila paralel dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Kompleksitas, efektifitas dan efisiensi layanan menjadi prinsip dasar IAIN Purwokerto dikatakan memiliki layanan prima atau tidak. Kondisi Objektif IAIN Purwokerto mengalami banyak perkembangan, baik dari sisi penyediaan layanan pendidikan maupun infrastruktur penunjang lainnya. Dari sisi layanan akademik, IAIN Purwokerto dari sejarah awal merupakan embrio

⁹ Abdul Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta : Samudra Biru, 2018), 3-4.

¹⁰ Mu'alimin, *Menjadi Sekolah Unggul* (Yogyakarta : Gending Pustaka, 2014), 77

IAIN Purwokerto sebagai bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Walisongo Semarang kini telah menjadi IAIN dan memiliki 21 Program Studi Sarjana, 6 Program Studi Pascasarjana dan 1 Program Strata 3 Studi Islam Interdisipliner. Hal itu merupakan perkembangan yang cukup drastis. Dari sisi infrastruktur, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tinggi dilakukan secara bertahap. Beberapa infrastruktur pendidikan yang terus dilakukan penyempurnaan adalah gedung, perangkat teknologi informasi, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. Ruang kuliah misalnya hingga akhir tahun 2019 telah bertambah menjadi 90 kelas. Masing-masing program studi dan fakultas memiliki ruang khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan praktek mahasiswa (laboratorium) dan sidang munaqasyah. Secara lebih detail, kondisi objektif IAIN Purwokerto dapat diklasifikasi dalam 2 kategori, yaitu internal dan eksternal. Kondisi internal menggambarkan faktor-faktor yang proses pemenuhannya dipengaruhi dan mengandalkan pada ketersediaan sumberdaya dari dalam. Kondisi eksternal memperlihatkan adanya faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pembentukan situasi yang terjadi dalam lingkungan IAIN Purwokerto. Kedua kondisi ini memberikan informasi yang utuh tentang IAIN Purwokerto dan penggambaran proses-proses perkembangan yang berlangsung.¹¹

Kondisi lain didukung dengan masukan (input) mahasiswa yang semakin bertambah. Input tersebut harus dikelola dengan baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif, efektif, dan efisien. Berikut data Input mahasiswa IAIN Purwokerto selama tiga tahun terakhir.

¹¹ Moh. Roqib, *Rencana Strategis IAIN Purwokerto Tahun 2020-2024*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019), 4-5

Tabel 1

Data Input Mahasiswa Baru IAIN Purwokerto 3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Tahun	Input Mahasiswa Baru	Lulus BTA-PPI	Tidak Lulus BTA-PPI	Output Seluruh Mahasiswa
1	2017-2018	2115	423	1724	600
2	2018-2019	2251	450	1800	600
3	2019-2020	2632	526	2105	813

Dari gambaran tabel di atas bisa dilihat bahwa setiap tahun input mahasiswa baru di IAIN Purwokerto setiap tahun semakin banyak. Upaya yang dilakukan dari pihak IAIN Purwokerto setiap tahun berbeda-beda. Pada tahun 2017 mereka menggunakan dengan cara mengundang seluruh Kepala Sekolah se BARKLINGMASCAGEP jenjang SMA,MA,SMK sederajat. Hal ini memberi tahu secara langsung kepada pihak sekolah untuk memilih peserta didiknya yang memiliki nilai rapor tinggi untuk mengikuti jalur SPAN. Pada tahun 2018-2019, pihak IAIN Purwokerto terjun langsung ke sekolah sekolah dengan berbagai wilayah seperti Brebes, Tegal, Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Kebumen, Banjarnatoman. Pada tahun 2019-2020, pihak IAIN Purwokerto hanya membagikan brosur dengan mencantumkan Beasiswa Afiriasi dengan ketentuan setiap peserta didik yang mempunyai prestasi dan kejuaraan 1, 2 dan 3 tingkat kabupaten di bidang Olahraga, MTQ, Tahfidz, SAINS, mereka bebas memilih prodi yang diminati. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tentunya atas kerjasama dari seluruh stakeholder IAIN Purwokerto. Mereka membutuhkan waktu sehari-hari dengan membagi per Prodi. Misalkan satu hari dari Fakultas Syariah maka seluruh stakeholder prodi tersebut dibagi rata untuk mensosialisasikan semua Fakultas yang ada di Iain Purwokerto.¹² Hal ini menunjukkan salah satu mutu perguruan tinggi yaitu Menumbuhkan persaingan dalam konteks kerja sama dan Mencegah lebih baik ketimbang memperbaiki.

Setelah mereka resmi menjadi mahasiswa IAIN Purwokerto, maka mereka wajib melakukan test yang disebut tes BTA-PPI. Dilihat dari segi

¹² Data diperoleh dari wawancara dengan bapak Kassubag Administrasi Akademik, Fatkhurrozi, M.Kom. Selasa, 25 Februari 2020.

inputnya dari tabel diatas tiap tahun berbeda beda. Mereka dari kalangan SMA/SMK, MA, Mahasiswa dari Pondok Pesantren, kemudian kejar paket. Dari gambaran besarnya trend setiap tahun input IAIN yang telah lulus dalam ujian BTA-PPI sekitar 18-20 %. Sedangkan yang tidak memenuhi hingga 80%.¹³ Dari sini lah maka maka program pesantrenisasi menjadi penting dimana itu menjadi standar mutu lulusan IAIN Purwokerto. Hal ini tercantum dalam RENSTRA yang berbunyi “ Semua lulusan memiliki pengalaman dan pengamalan keagamaan yang kokoh. Strategi yang dilakukan adalah pengondisian suasana akademis berbasis religiusitas dan pogram ujian kompetensi dasar Baca Tulis Al-Qur’an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (BTA-PPI).

Program pesantrenisasi dibuat sebagai jawaban dari masyarakat bahwa kualitas lulusan mahasiswa IAIN Purwokerto masih banyak yang belum menguasai materi agama dengan baik terutama Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) dan Pengamalan Pelaksanaan Ibadah (PPI). Karenanya program ini menjadi sangat penting bagi civitas akademik kampus berbasis Islam terutama IAIN Purwokerto sehingga lulusannya dapat menjadi teladan bagi masyarakat terutama dalam kemampuan bidang agama. Dalam prosesnya, program ini juga harus dikawal agar benar-benar mampu menghasilkan output yang berkemampuan sehingga program ini tidak sekedar asal jalan tapi benar-benar di manag dengan baik. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan program ini adalah dengan diadakan test akhir setelah mahasiswa mengikuti program ini.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan ada ketertarikan untuk membahas lebih dalam terkait kebijakan program pesantrenisasi. Biasanya yang terjadi di perguruan tinggi yang lain seperti UIN Malang mereka tidak bercabang tetapi dikelola oleh kampus itu sendiri dan berupa asrama bukan pondok pesantren. Zaman milenial sekarang, perguruan tinggi masih bertahan menerapkan program pesantrenisasi dengan melakukan kerja sama MoU antar mitra pesantren dan dikemas menggunakan system tidak hanya mengandalkan SDM nya saja

¹³ Data diperoleh dari wawancara dengan Admin Ma’had IAIN Purwokerto, Lutfie Muamar Selasa, 25 Februari 2020.

¹⁴ Data Wawancara dengan Pimpinan Ma’had IAIN Purwokerto, KH. Nasruddin, M.Ag. Jum’at, 1 Oktober 2019

merupakan sebuah kehebatan sendiri bagi perguruan tinggi tersebut dengan memperhatikan input dan out putnya. Kemunculan pesantren di perkotaan juga merupaakn indicator penting bahwa lembaga pendidikan model pesantren semakin dibutuhkan dan diminati. Hal ini yang menjadi tertarik peneliti bagaimana kebijakan program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat, dimana transaksi layanan tersebut dilakukan. Pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di lembaga pendidikan tersebut. Dengan kata lain upaya untuk mendekati *stakeholders* pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan yang menyangkut pemerataan dan perluasan layanan, mutu, relevansi dan efisisensi pengelolaan pendidikan.

Berdasarkan paradigma tersebut, untuk menjadikan arah dalam peneletian ini lebih focus dan analisis yang dihasilkan lebih tajam dan mendalam, maka kajian dalam penelitian ini difokuskan dalam level insitusi perguruan tinggi membahas tentang kebijakan program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto. Identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan “
Bagaimana kebijakan program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama yang berperan dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kajian lebih lanjut mengenai kebijakan program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto
 - b. Dapat dijadikan salah satu tambahan khazanah ilmu pengetahuan menyangkut program pesantrenisasi.
 - c. Dapat dijadikan rujukan dalam penerapan program pesantrenisasi
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dan semua pihak yang berkepentingan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi pengelola pendidikan khususnya di lembaga pesantren.
 - c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka yang berfungsi memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam tesis ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dikerangkakan dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian teoritik, yakni sub bab pertama membahas kebijakan pendidikan yang terdiri beberapa sub bab meliputi pengertian kebijakan pendidikan, batasan kebijakan pendidikan, karakteristik kebijakan pendidikan, cakupan kebijakan pendidikan, pendekatan kebijakan pendidikan dan proses perumusan kebijakan pendidikan. Kemudian sub bab kedua mengenai Program Pesantrenisasi yang terdiri beberapa sub bab meliputi

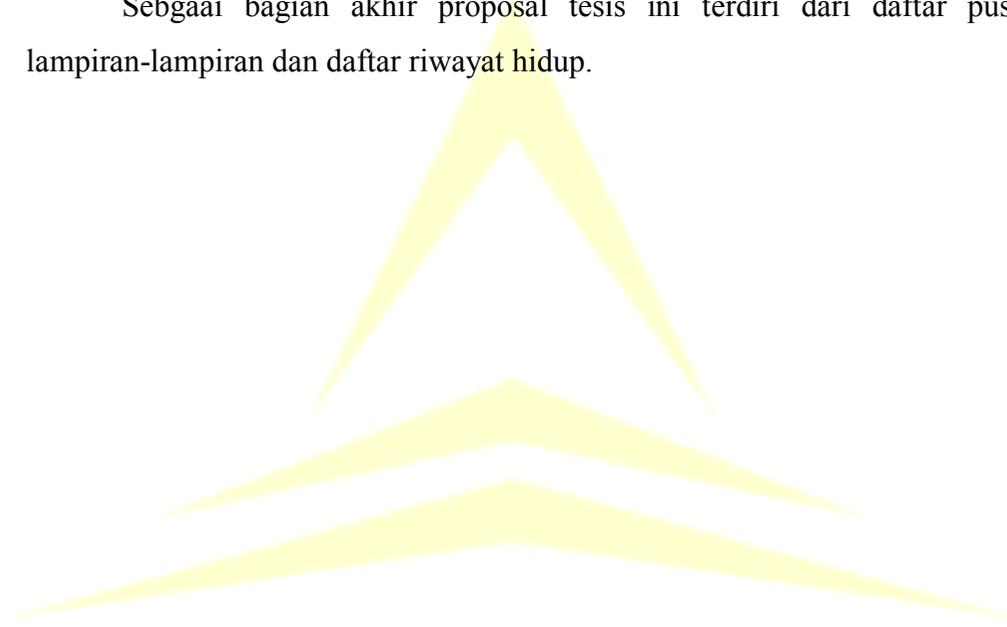
sejarah pesantren, pengertian pesantren, tujuan dan fungsi pesantren, dan kurikulum pesantren.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, yang meliputi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, data dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian tentang penyajian data, dan analisis data.

Bab kelima penutup meliputi kesimpulan dan saran

Sebagai bagian akhir proposal tesis ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

KEBIJAKAN PROGRAM PESANTRENISASI

A. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, juga dapat dijumpai dalam bahasa lain, seperti Inggris, Latin, Yunani, dan Sanskrit. Dalam bahasa Inggris, istilah *policy* berarti kebijakan. Latin: Politea, pemerintahan *settled course dopted and followed by a government* (suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok, dan sebagainya). *Polis* dalam bahasa Yunani berarti Negara kota. *Pur* dalam bahasa Sanskrit berarti kota. *Police* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum atau bisa juga berarti administrasi pemerintah.

Terry menjelaskan arti kebijakan, yaitu petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah tindakan dan aturan yang harus diikuti oleh pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengelolaan dan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi pemecahan masalah atau problem yang dihadapi.¹⁵

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem social bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni : 1) tingkat hidup masyarakat meningkat, 2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, 3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternative yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tidak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif¹⁶

¹⁵ G.R. Terry, *Principles of Management* (6th ed) (London: Richard D.Irwin Inc, t.th), 186.

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Raka Sarasini, 2000), 15.

Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin Priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong inisiatif tetapi dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.¹⁷

Kebijakan menurut Tilaar dan Nugroho merupakan fakta strategis dari pada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, kebijakan sudah terangkum prefensi-prefensi politis dari para actor yang terlibat dalam proses kebijakan, terutama pada tahap perumusan kebijakan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan tidak saja bersifat positif namun juga bisa bersifat negative, dalam artian bahwa yang diambil menerima yang satu dan menolak lainnya. Walaupun dalam kebijakan ada ruang bagi *win-win solution* dimana semua kepentingan dapat diakomodasi, namun ruang tersebut sangatlah kecil, kebanyakan kebijakan lebih mengarah pada *zero-sum-game* yaitu menerima salah satu dari sekian banyak pilihan.¹⁸

Kebijakan pendidikan menyangkut keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Suatu kebijakan akan sulit dilaksanakan jika pada tahap implementasinya tidak cukup memperoleh dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses pengimplementasian suatu kebijakn dapat dipengaruhi oleh dua unsur yaitu adanya program (kebijakan) yang akan dilaksanakan dan adanya unsur pelaksana (implementer) baik dalam bentuk organisasi maupun perorangan yang akan bertanggungjawab dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan.¹⁹

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu landasan berpikir, bertindak, sarana, petunjuk, pengaturan, program dan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung usaha pelaksana kebijakan dan pengambilan keputusan suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

¹⁷ Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Pasca Sarjana UNJ, 2008. 15.

¹⁸ H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan : Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 185.

¹⁹ Umi Muzayanah, *Manajemen Madrasah sebagai Media Strategis Pendidikan Karakter*, Jurnal Analisis Ilmu Sosial dan Agama, Vol.12 No.2, 2014, 30.

2. Batasan Kebijakan Pendidikan

Pembahasan yang terarah dan memiliki titik temu yang tepat membutuhkan suatu batasan-batasan, demi menghindari pembahasan yang melebar dan sia-sia, maka terlebih dahulu dipahami konsep kebijakan.

Kebijakan berasal murni dari pertimbangan akal manusia, sekalipun demikian manusia yang lebih dominan dalam pemilihan opsi-opsi kebijakan, karena dalam penuntasannya terdapat penekanan kebijaksanaan dari factor emosional dan irasional, bukan berarti kebijakan tidak rasional akan tetapi mungkin saja pada saat itu rasional belum tercapai atau merupakan intuisi. Kebijakan pada umumnya adalah pedoman untuk menuju tujuan yang terarah, sedangkan menurut Carl Friedrich dalam Hasbullah, bahwa kebijakan adalah suatu bentuk pengarahan demi mencapai tujuan dari hasil yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan. Sedangkan disisi lain ada yang berpendapat bahwa pemerintah pun memiliki wewenang di dalam memutuskan kebijakan pendidikan sehingga jika pemerintah memilih sesuatu maka harus memiliki tujuan dan semuanya meliputi tindakan pemerintah, bukan semata-mata dari keinginan pemerintah semata. Kebijakan pendidikan jika dilihat merupakan seperangkat aturan yang keberpihakannya dimiliki oleh pemerintah demi terciptanya pendidikan yang sesuai dengan cita-cita sehingga sampai dengan tujuan yang diinginkan, keberpihakan disini termasuk politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan dan sebagainya.

Beberapa pendapat sebelumnya jika diperhatikan dapat menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan instrument yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melalui kajian dari pada pemikiran dan pengalaman seseorang, kelompok atau pemerintahan demi terwujudnya perubahan yang semakin baik dan menutupi ketidakcocokan dari kebijaksanaan sebelumnya, sehingga bisa saja terjadinya tambahan kebijakan bahkan perubahan total. Demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh seluruh pemeran pendidikan.

3. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Ali Imron berpendapat dalam bukunya Rijal bahwa karakteristik kebijakan pendidikan meliputi sebagai berikut :

a. Memiliki tujuan pendidikan

Karakteristik yang paling menonjol dari pada munculnya kebijakan pendidikan yaitu harus memiliki tujuan, terkhusus kepada tujuan pada bidang pendidikan yang jelas dan terarah demi berkontribusi pada pendidikan.

b. Memiliki aspek legal-formal

Berlakunya kebijakan pendidikan tentu harus mendapatkan pengakuan dari wilayah jika telah melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga harus adanya pemenuhan atas pra-syarat yang dilalui terlebih dahulu. Sehingga, kebijakan tersebut dapat memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di setiap kebijakan tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimate.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan suatu panduan yang bersifat umum, maka ia harus memiliki manfaat agar dapat diterapkan, agar memiliki tujuan pendidikan yang jelas, sehingga sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Adapun konsep operasional pada bidang ini menurut Ali Imron dalam Rusdiana sebagai berikut :

1) Dibuat oleh yang berwenang

Perumusan kebijakan pendidikan juga dibuat oleh para ahli dibidang tersebut, agar tidak terjadinya kerusakan baik itu di dalam ataupun di luar lingkungan pendidikan. Adapun para pembuat kebijakan adalah para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan, merekalah unsur minimal dalam pembuatan kebijakan pendidikan.

2) Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan tidak akan luput dari kesalahan ataupun kekeliruan, oleh karena itu jika kebijakan yang diterapkan dianggap baik, maka perlu untuk dipertahankan atau bahkan dikembangkan, sebaliknya jika kebijakan yang diterapkan memiliki kesalahan, maka harus bisa diperbaiki, sehingga kebijakan pendidikan melalui karakter yang dapat melalui kemungkinan adanya evaluasi demi melalui perbaikan dengan mudan dan efektif.

3) Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan harus memiliki kejelasan dalam sistematikanya agar jelas dan dapat mengatur seluruh aspek. Sistematika ini dituntut agar jelas dan dapat mengatur seluruh aspek. Sistematika ini dituntut agar lebih efektifitas dan efisiensi demi kebijakan tersebut tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan memiliki struktur yang rapuh akibat adanya serangkaian factor yang hilang atau berbenturan dengan yang lainnya. Oleh karenanya

perlu perhatian khusus agar tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Sedangkan secara eksternal kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan yang lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, dan yang lainnya.

4. Cakupan Kebijakan Pendidikan

Torjman, menyebutkan bahwa ada beberapa cara untuk melihat kebijakan yang dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat substantif dan administrative, kebijakan vertical dan horizontal, kebijakan reaktif dan proaktif, serta kebijakan saat ini (*current policy*) dan kebijakan mendatang (*future policy*).

a. Kebijakan Substantif dan Administratif

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang bersangkutan paut dengan perundang-undangan program, serta praktik yang mengatur aspek substantif kinerja masyarakat. Sedangkan kebijakan administrative merupakan kebijakan yang bersangkutan paut dengan prosedur administrative.

b. Kebijakan Vertikal dan Horizontal

Lebih lanjut, kebijakan substantif dan administratif dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan vertical atau horizontal. Kebijakan vertical merupakan kebijakan yang dikembangkan dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk penerapannya. Sedangkan, kebijakan horizontal dikembangkan oleh dua atau lebih organisasi, yang masing-masingnya mempunyai kemampuan atau kewenangan untuk berurusan dengan hanya satu dimensi dalam situasi tertentu.

c. Kebijakan Reaktif dan Proaktif

Kebijakan juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan reaktif atau proaktif. Kebijakan reaktif timbul sebagai respon terhadap suatu hal yang penting atau permasalahan yang harus diselesaikan, misalnya keadaan darurat kesehatan dan bencana alam. Sedangkan, kebijakan proaktif dibentuk dan dikembangkan dengan sengaja. Sebagai contoh kebijakan proaktif adalah kebijakan yang berkaitan dengan ketrampilan nasional dan agenda pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu kunci penting untuk membuka pintu menuju kesejahteraan ekonomi dan social yang lebih baik.

d. Kebijakan Saat Ini dan Mendatang

Selain ketiga kategori tersebut, cara lain untuk menggolongkan kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan sedang berlaku sebagai agenda public atau tidak. Permasalahan yang menjadi agenda public seringkali merupakan permasalahan yang penting. Sedangkan permasalahan yang sedang tidak menjadi agenda public perlu juga diperhatikan jika kepentingannya nanti meningkat dan menimbulkan implikasi lebih lanjut.²⁰

5. Pendekatan Kebijakan Pendidikan

Beberapa pendekatan yang bisa digunakan analisis megimplementasikan kebijakan, pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* yaitu pendekatan penurunan alternative kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Dalam proses implementasinya, peran pemerintah sangat besar. Pada pendekatan ini asumsi yang memungkinkan para pengambil keputusan merupakan actor kunci dalam keberhasilan implementasi. Kebijakan yang bersifat *top-down* merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan Negara, seperti kebijakan anti terorisme, radikalisme, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional dan lainnya.

Pendekatan *bottom-up* yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat), didasarkan pada proses kebijakan yang bersumber dari penyampaian aspirasi masyarakat lapisan bawah, berupa permintaan ataupun dukungan. Implementasi kebijakan berusaha mendorong masyarakat untuk menyampaikan harapannya, permasalahan yang dihadapi, termasuk memberikan kesempatan pada level bawah untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya tidak strategis. Kebijakan lebih efektif, jika diimplementasikan secara *bottom-up*, berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan *national security*, seperti kebijakan alat kontrasepsi, padi varietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan sejenisnya, sifatnya pada area tertentu dan bidang yang tidak vital. Dalam implementasi kebijakan, alternative pilihan yang paling efektif jika bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan yang partisipatif, artinya bersifat *top-down* dan *bottom-up* dan mengkombinasikan (*mixing*) *top-down* dan *bottom-up* nya.²¹

²⁰ Abdul Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018), 67-68.

²¹ Arwildayanto, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif* (Bandung: Cendekia Press, 2018), 85-86.

6. Proses Peumusan Kebijakan Pendidikan

Pembuatan kebijakan pendidikan merupakan salah satu fungsi penting dalam sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan pendidikan yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dai pembuat kebijakan terhadap kewenangan yang dimiliki.

Hal ini terkait dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gerston, bahwa kebijakan dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, menurut Gerston hal yang penting lainnya adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dilayaninya. Dengan pemahaman yang seperti itu, dapat memastikan pembuatan kebijakan public yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnya sebuah kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.

B. Program Pesantrenisasi

1. Sejarah Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah bentuk lembaga pendidikan yang eksistensinya cukup lama di Negara Indonesia dan terbukti memiliki kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa mulai dari masa Kerajaan hingga perlawanan terhadap penjajahan. Pada masa kemerdekaan pondok pesantren menunjukkan peran besar sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghadirkan alternative baru dari system pembelajaran modern. Penggunaan metode dan system yang berbeda itulah pesantren menjalankan transformasi ilmu pengetahuan kepada para penuntut ilmu yang ada. Kondisi perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan system pendidikan Belanda adalah kata kunci untuk memahami keberadaan pondok pesantren yang hingga sampai sekarang memegang system salaf kuno.²²

²² Kholid Junaidi, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia* (Suatu Kajian Sistem Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo), ISTAWA : Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2, No 1, Juli-Desember (2016), 96.

Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat, terutama dipedesaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Awal kehadiran pondok pesantren bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al din*) dengan menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Munculnya pesantren di Indonesia diperkirakan sejak 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir di seluruh lapisan masyarakat muslim terutama di Jawa. Pesantren merupakan lembaga yang unik. Tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kuktur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Karena keunikannya itu, C. Geertz demikian juga Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai subkultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa). Pada zaman penjajahan, pesantren menjadi basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi.²³

Dalam catatan sejarah, berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kyai yang menetap (bermukim) disuatu tempat. Kemudian datanglah santri yang ingin belajar kepadanya dan di luar. Turut pula bermukim di tempat itu. Sedangkan biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-sama oleh para santri dengan dukungan masyarakat di sekitarnya. Hal ini memungkinkan kehidupan pesantren bisa berjalan stabil tanpa dipengaruhi oleh gejolak ekonomi di luar. Pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman walisongo. Karena itu pondok pesantren adalah salah satu tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan murid, kiyai dan santri dalam intensitas yang relative dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan diantara para santri ada yang berasal dari Gowa dan Tallo, Sulawesi. Dilihat dari sejarahnya, pesantren memiliki usia yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia. Syaikh Maulana Malik Ibrahim dapat dikatakan sebagai peletak

²³ Imam Syafe'I, *Pondok Pesantren : Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, Mei (2017), 86.

dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren pada masa awal pendiriannya merupakan media untuk menyebarkan Islam dan karenanya memiliki peran besar dalam perubahan social masyarakat Indonesia.²⁴

Dalam dinamika perkembangannya, pesantren tetap kokoh dan konsisten mengikatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Realitas ini tidak saja dapat dilihat ketika pesantren menghadapi banyak tekanan dari pemerintah colonial Belanda. Namun pada masa pasca proklamasi kemerdekaan pesantren justru dihadapkan pada suatu tantangan berat yaitu adanya ekspansi system pendidikan umum dan madrasah modern. Meskipun demikian pesantren justru tertantang untuk tetap survive dengan cara menempatkan diri sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersifat adaptif menerima dinamika kehidupan. Bahkan sejak dasawarsa 1970-an banyak pesantren memberikan pembekalan dan ketrampilan ekonomi bagi santrinya, serta terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di lingkungannya. Selanjutnya pada tahun 1989 pemerintah memberlakukan UU No. 2 tahun 1989 tentang system pendidikan diantaranya pendidikan keagamaan. Pendidikan Keagamaan dalam Undang-Undang ini dikategorikan ke dalam jalur pendidikan sekolah. Realitas di atas menunjukkan bahwa perkembangan pesantren terus menapaki tangga kemajuan, bahkan ada kecenderungan menunjukkan trend, di sebagian pesantren telah mengembangkan kelembagaannya dengan membuka system madrasah, sekolah umum, dan diantaranya ada yang membuka semacam lembaga pendidikan kejuruan seperti bidang pertanian, peternakan, teknik, dan sebagainya. Keterbukaan pesantren terhadap perkembangan zaman makin terlihat sekarang ini ketika muncul fenomena baru dalam dunia kepesantrenan, yaitu munculnya

²⁴ Herman, *Sejarah Pesantren di Indonesia*, Jurnal Al-Ta'dib Vol. 6 No. 2 Juli-Desember (2013), 148.

pesantren dengan label “Hahasiswa”. Pesantren ini mengkhususkan peserta didiknya dari kalangan mahasiswa.²⁵

2. Pengertian Pesantren

Istilah pesantren berasal dari kata pe- “santri” – an, dimana kata “santri” berarti murid dalam bahasa Jawa. Istilah “pondok” berasal dari bahasa Arab “funduq” yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama “dayah”. Sedangkan pesantrenisasi berasal dari kata pesantren dan mendapatkan akhiran *isasi* yang artinya sebuah proses sebuah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Dengan demikian, ciri-ciri pondok pesantren adalah adanya kyai, santri masjid dan pondok.²⁶

Menurut istilah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Menurut Abdur Rahman Wahid pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks itu berdiri beberapa buah bangunan, rumah kediaman pengasuh (di daerah bahasa Jawa disebut *Kyai*, di daerah berbahasa Sunda *ajogan*, dan di daerah berbahasa Madura *nun* atau *bendara*, disingkat *ra*) : sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran diberikan (bahasa Arab madrasah yang juga terlebih sering mengandung konotasi sekolah) dan asrama tempat tinggal para siswa pesantren. Pesantren adalah suatu bentuk lingkungan masyarakat yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif yang mempunyai ciri khas tersendiri, sebagai lembaga

²⁵ Samsudin Salim & Toha Makhsun, *Manajemen Pesantren Mahasiswa* (Studi Kasus Manajemen Pesantren Aji Mhasiswa Al Muhsin Yogyakarta, Al Fikr Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam Vol 1 No 2 (Agustus) 2018, 59.

²⁶ Moh. Roqib, Nurfuadi, *Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru Yang Sehat Di Masa Depan*, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2011), 77.

pendidikan Islam. Pondok pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri dimana kyai, ustadz dan santri dan pengurus pesantren hidup bersama dalam satu lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaanya tersendiri.²⁷

Sejarah telah mencatat bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan yang sudah sejak lama dikenal sebagai kawah condrodimuko bagi pengembangan masyarakat (*community development*) . Dalam rentang waktu yang demikian panjang, perkembangan pesantren telah mampu menunjukkan jatidirinya sebagai lembaga pendidikan yang selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.²⁸

Abdurrohman mengidentiikasi beberapa pola umum pendidikan Islam tradisional sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan yang akrab antara kyai dan santri
 - b. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kyai
 - c. Pola hidup sederhana (*zuhud*)
 - d. Kemandirian atau indenpendensi
 - e. Berkembangnya iklim dan tradisi tolong-menolong dan suasana persaudaraan
 - f. Disiplin ketat
 - g. Berani menderita untuk mencapai tujuan
 - h. Kehidupan dengan tingkat religiusitas yang tinggi.²⁹
3. Fungsi dan Tujuan Pesantren

Kehadiran pondok pesantren ditengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama, social keagamaan. Dan tidak hanya berhenti sebagai aktifitas transfer ilmu saja. Azyumardi Azra menyebutkan, selain sebagai transfer ilmu, pesantren

²⁷ Zulhimma, *Dinamika Pperkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, Jurnal Darul ‘ilmi Vol. 01, No. 02 (2013), 166-167.

²⁸ Samsudin Salim & Toha Makhsun, *Manajemen Pesantren Mahasiswa* (Studi Kasus Manajemen Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Yogyakarta), Al-Fikri : Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam Vo1 No, 2 Agustus (2018), 59.

²⁹ Kholid Junaidi, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia* (Suatu Kajian Sistem Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo), ISTAWA : Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2, No 1, Juli-Desember (2016), 99.

juga sebagai kaderisasi ulama' dan sebagai pemelihara budaya Islam. Dua unsur tambahan tersebut perlu ditekankan sebab seorang ulama' bukan sekedar orang yang memiliki penguasaan ilmu yang tinggi, tetapi juga harus disertai dengan kemampuan mengamalkan ilmu tersebut. hal senada juga dikemukakan oleh Tolkhah Hasan mantan menteri agama RI, bahwa pesantren seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaquh fi al- din*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*) .
- 2) Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan control social.
- 3) Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa social (*Sosial Engineering*) atau perkembangan masyarakat (*Community Development*) . Semua itu, menurutnya hanya bisa dilakukan jika pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan peranan sebagai *Agent Of Change*.³⁰

Adapun tujuan dibentuknya pondok pesantren adalah :

- a. Mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama.

Dalam hal ini dijelaskan dalam surat Attaubah ayat 122 yang artinya:” tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang) . Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” Dalam ayat ini dijelaskan hendaknya ada pengawal umat yang memberi peringatan dan pendidikan pada umatnya untuk berfikir, berperilaku serta berkarya sesuai ajaran Islam.

- b. Mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama.

Para santri yang telah menamatkan pelajarannya, walaupun tidak sampai ke tingkat ulama, setidaknya mereka harus mempunyai

³⁰ Imam Syafe'I, *Pondok Pesantren : Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, Mei (2017), 92-93.

kemampuan melaksanakan syariat agama secara nyata dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan suatu peradaban dalam prespektif Islami.

- c. Mendidik agar objek memiliki ketrampilan dasar yang relevan dengan terbentuknya masyarakat beragama.

De ngan demikian tujuan pesantren dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

- 1) Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.
- 2) Tujuan umum, yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang yanggup dengan ilmu agamanya menjadi muballigh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.³¹

Dalam kaitan dengan pembangunan sekarang ini, maka tujuan tersebut tidak lepas dari ciri-ciri tujuan bangsa yang telah ditetapkan dalam UU 1945, yaitu bahwa dasar pendidikan adalah Pncasila yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja professional, bertanggung jawab, produktif dan sehat jasmani maupun ruhani. Tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa usaha pendidikan harus dapat menghasilkan manusia yang harmonis lahir dan batin. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan pondok pesantren harus dibina dan dikembangkan lebih insentif. Sebagai contoh para santri dibekali dengan ilmu agama, namun juga dibekali ilmu ketrampilan

³¹ Zuhlamma, *Dinamika Pperkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, Jurnal Darul ‘ilmi Vol. 01, No. 02 (2013), 168-169.

praktis lainnya dengan harapan para santri dapat bekerja di tengah-tengah masyarakat dan dapat memajukan ke arah yang lebih baik.³²

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan system yang memiliki beberapa subsistem, setiap sub system memiliki beberapa sub-sub system dan seterusnya, setiap sub system dengan sub system yang lain saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Sub system dari system pendidikan pesantren antara lain :

- a. Aktor atau pelaku : Kyai, ustadz, santri dan pengurus.
- b. Sarana perangkat keras : Masjid, rumah Kyai, rumah dan asrama ustadz, pondok dan asrama santri, gedung sekolah atau madrasah, tanah untuk pertanian dan lain-lain.
- c. Sarana perangkat lunak : Tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib perpustakaan, pusat penerangan, ketrampilan, pusat pengembangan masyarakat , dan lain-lain.³³

4. Kurikulum Pesantren

Kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Makna kurikulum juga dapat merujuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi. Disamping itu, kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat yang mencakup lingkup tertentu, baik suatu sekolah, kabupaten, propinsi ataupun seluruh Negara.³⁴

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) dinyatakan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran

³² Ahmad Saifuddin, *Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 03 No. 01, Mei (2015), 220.

³³ Kholid Junaidi, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia* (Suatu Kajian Sistem Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo), ISTAWA : Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2, No 1, Juli-Desember (2016), 97.

³⁴ Ahmad Saifudin, *Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 03 No. 01, Mei (2015), 208.

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁵

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan system asrama (pondokan) yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui system pengajian atau madrasah yang sepenuhnya dibawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat karismatis serta independen dalam segala hal, pondok pesantren tumbuh subur di tanah Indonesia jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Pesantren dapat dikatakan sebagai lembaga non-formal Islma, karena keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal.³⁶

Sebagai respon dari bentuk perubahan kurikulum dan kebijakan pemerintah, maka pondok pesantren harus bersedia menggeser orientasi untuk mampu melakukan kolaborasi kurikulum yang selama ini berjalan di lembaganya. Unsur pondok pesantren sendiri meliputi kyai, masjid, santri, pondok atau asrama dan pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning). Kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi SAW sampai sekarang, yang berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, tempat ibadah, tempat pengadilan tempat pendidikan dan sebagainya. Santri adalah orang-orang yang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren. Para santri utu biasanya tinggal di pondok atau asrama, namun ada pula yang pergi pulang dari rumahnya.³⁷

³⁵ Tim Visimedia, *UU Nomor 20 Tahun 2003 & UU No. 14 th 2005*, Jakarta Visimedia, 2008.

³⁶ Ahmad Saifudin, *Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 03 No. 01, Mei (2015), 209.

³⁷ Ahmad Saifudin, *Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 03 No. 01, Mei (2015), 214- 215.

Dalam konteks pendidikan di pondok pesantren seperti yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid bahwa istilah kurikulum tidak terkenal di dunia pesantren (masa pra kemerdekaan) , karena tujuan pendidikan pesantren sering hanya ditentukan oleh kebijakan kyai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut. Dalam perkembangannya, untuk menghadapi tantangan modernitas khususnya pendidikan Islam, pesantren dengan jenis coraknya menggunakan kurikulum, sehingga tidak ada keterasingan istilah kurikulum di dunia pesantren. Kurikulum yang dikembangkan di pondok pesantren dapat dibedakan menjadi beberapa macam sesuai jenis pola pesantren itu sendiri , yaitu :

- a. Pesantren Salaf (Tradisional) , kurikulum pesantren salaf yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non formal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi : *Tauhid, tafsir, hadist, ushul fiqih, tasawuf, bahasa arab (Nahwu, sharaf, balaghoh dan tajwid) , mantik, akhlak*. Pelaksanaan kurikulum pesantren ini berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Jadi ada tingkat awal, menengah dan tingkat lanjutan.
- b. Pesantren Modern, pesantren jenis ini yang mengkombinasikan antara pesantren salaf dan juga model pendidikan formal dengan mendirikan satuan pendidikan semacam SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA bahkan sampai pada perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pesantren salaf yang diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Departemen Agama dalam sekolah (Madrasah). Sedangkan kurikulum khusus pesantren dialokasikan dalam muatan local atau mungkin diterapkan melalui kebijaksanaan sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi (madrasah) pada waktu kuliah. Sedangkan waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam

untuk mengkaji keilmuan islam khas pesantren (pengajian kitab klasik).³⁸

Dari segi bentuk, pondok pesantren secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, sebagaimana dituangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang bantuan pondok pesantren, yang mengkategorikan pondok pesantren menjadi pondok pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional (tipe A), pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal atau *madrasi* (tipe B), pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar (tipe C), dan pondok pesantren yang hanya mengajarkan system pondok pesantren dan sekaligus system sekolah atau madrasah (tipe D).³⁹

Dalam rentang waktu yang sedemikian panjang, perkembangan pesantren telah mampu menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan yang selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sjahur kurun waktu itu pula bentuk-bentuk pendidikan di pesantren mengalami perbedaan yang bervariasi yang dapat diklasifikasi sedikitnya menjadi lima tipe :

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum nasional baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki umum (SD, SLTP, SMU, SMK, dan Perguruan Tinggi Umum), seperti pesantren Tebu Ireng Jombang, pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan pesantren Syafi'iyah Jakarta.
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menetapkan kurikulum nasional, seperti pesantren Gontor Ponorogo, pesantren Maslakul Huda Kajen Pati (Matholi'ul Falah) dan Darul Rahman Jakarta.

³⁸ Kholid Junaidi, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia* (Suatu Kajian Sistem Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo), ISTAWA : Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2, No 1, Juli-Desember (2016), 105-106.

³⁹ Ahmad Saifuddin, *Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 03 No. 01, Mei (2015), 217.

- c. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah, seperti pesantren Salafiyah Langitan Tuban, Lirboyo Kediri dan Pesantren Tegalrejo Magelang.
- d. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majlis ta'lim), dan
- e. Kini mulai berkembang pula nama pesantren untuk asrama anak-anak pelajar sekolah umum dan mahasiswa.⁴⁰

C. Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah mengkaji beberapa literature, penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wildan Novia Rosydiana dengan judul Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Hizbul Wathan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Banyumas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya Kwarda HW Banyumas telah sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh HW dalam mencapai yang dilakukan oleh HW Banyumas dalam mencapai maksud dan tujuannya untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan. Semua muatan yang terdapat kebijakan program pendidikan karakter yang terdapat dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi : religious, jujur, tanggung jawab, gemar membaca, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri , toleransi, peduli social, menghargai karya dan prestasi, komunikatif, cinta damai, demokratis, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Muatan masing-masing nilai pendidikan karakter diimplementasikan melalui materi dan kegiatan ke Hizbul Wathan an dan materi umum. Pengembangan nilai-nilai pendidikan

⁴⁰ Samsudin Salim & Toha Makhsun, *Manajemen Pesantren Mahasiswa* (Studi Kasus Manajemen Pesantren Aji Mhasiswa Al Muhsin Yogyakarta, Al Fikr Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam Vol 1 No 2 (Agustus) 2018, 60-61.

karakter pada masing-masing kegiatan HW dilakukan dengan kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan dan pengkondisian, dengan pendekatan yang telah sesuai dengan amanat pendidikan karakter Nasional.⁴¹

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Arian Sahidi dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto). Hasil penelitiannya menunjukkan kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan untuk lima keperluan, yaitu : penjarangan (sreening), pengalihanganan (referal), kalsifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Ada 3 model pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi , yaitu : model kurikulum umum(regular), model kurikulum umum dengan modifikasi dan model kurikulum yang diindividualisasikan. Tenaga pendidik di sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusi terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK). Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusi diselenggarakan. Bila memang dibutuhkan, sekolah bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Provinsi untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kegiatan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan dengan beberapa cara yaitu : *integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group, program khusus dan therapy.*⁴²

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Supriatini Chandra Sari yang berjudul Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banyumas. Hasil penelitiannya adalah

⁴¹ Wildan Novia Rosydiana, *Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Hizbul Wathan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Banyumas*, Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016.

⁴² Arian Sahidi, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto)*, Tesis UIN Malang, 2016.

rekrutmen peserta didik baru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banyumas memperoleh jumlah peserta didik yang banyak jika dibandingkan dengan sekolah/madrasah tingkat dasar di sekitarnya yaitu : *pertama*, penjangkaran dilakukan dengan sosialisasi sepanjang masa dengan cara mengikuti perlombaan, meramaikan kegiatan masyarakat, organisasi, dan madrasah membuat kalender dan adanya Buku Calon Siswa Kelas 1. *Kedua*, menerapkan zonasi dengan mempertimbangkan jarak tinggal calon peserta didik dengan madrasah, skor tertinggi bagi calon peserta didik baru yang tinggal di desa watuagung dan Purwodadi. *Ketiga*, hasil rekrutmen peserta didik baru menggunakan system seleksi berdasarkan jumlah dari unsur-unsur : Kartu Keluarga, akte kelahiran, alamat, usia, prestasi, mengaji, menulis huruf hijaiyah, hafalan surat pendek, hafalan doa harian, membaca , menulis dan wawancara dengan calon wali murid.⁴³

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Juniar Dewantara dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Pendidikan Inklusi di SDN Betet Kota Kediri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa landasan hukum penyekenggaraan pendidikan inklusif sudah sesuai Undang-aundang Sistem Pendidikan yang berlaku di Indonesia. Tujuan pendidikan inklusif sudah sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Hasil temuan komponen input menunjukkan input ABK yang bersekolah jumlahnya cukup banyak. Namun pada komponen SDM terutama GPK dan sarana prasarana masih memerlukan perhatian untukmeningkatkan dan melengkapinya. Hasil temuan komponen proses menunjukkan proses penerimaan siswa, kegiatan belajar mengajar dan penilaian siswa telah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun masih ada siswa yang tidak seharusnya masuk di sekolah inklusif menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Hasil temuan komponen produk menunjukkan terdapat prestasi yang berhasil diraih oleh siswa inklusif dan dampak positif dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar tetap

⁴³ Supriatini Chandra Sari, *Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banyumas*, Tesis, IAIN Purwokerto, 2017.

melaksanakan program tersebut dan terus berkomunikasi serta berkolaborasi dengan lembaga dan beberapa pihak terkait dalam menjalankan program pendidikan inklusif agar lebih optimal.⁴⁴

Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ali Roziqin, Irfan Murtadho Yusuf dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi : Studi Kasus di Universitas Diponegoro. Hasil penelitiannya menunjukkan kebijakan tersebut masih ditemui beberapa masalah seperti salah sasaran, penyaluran uang saku bulanan yang masih sering terlambat, birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya monitoring serta koordinasi dari stakeholder yang terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada stakeholders yaitu melakukan penyesuaian biaya hidup bulanan yang diberikan kepada mahasiswa, memberikan pelatihan manajemen keuangan dan entrepreneurship, meningkatkan selektifitas dalam penetapan mahasiswa bidikmisi, menyederhanakan proses birokrasi sehingga tidak menghambat proses pencairan biaya hidup bulanan, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa bidikmisi dengan program yang sifatnya memperdayakan, serta memperbaiki system monitoring dan koordinasi mulai dari tingkat jurusan hingga universitas dengan sebuah system yang terintegrasi.⁴⁵

D. Kerangka Berpikir

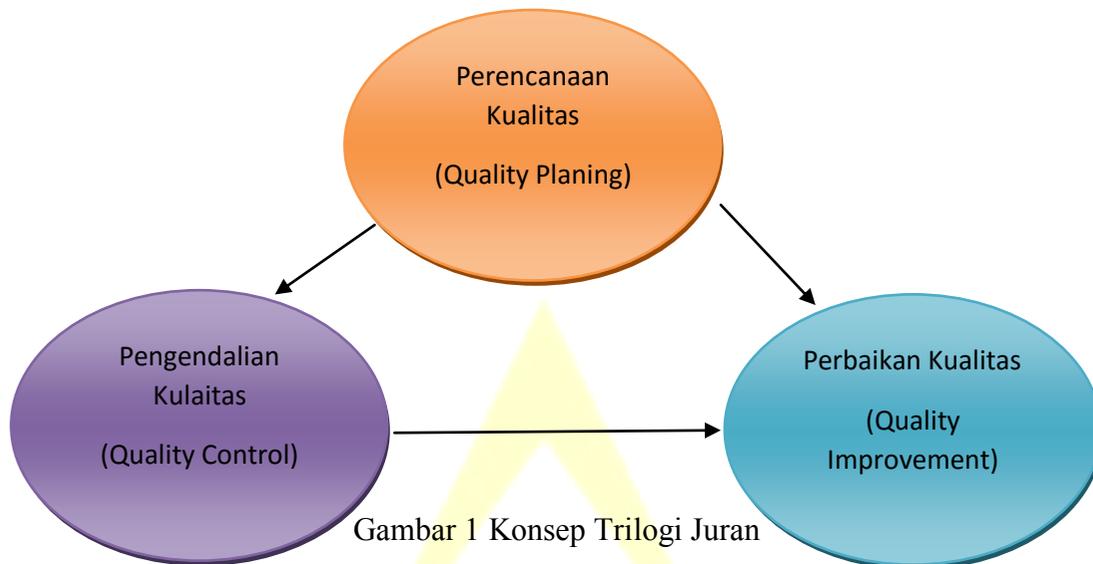
Tema atau focus penelitian yang akan digarap yaitu tentang Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto. Tema atau focus dalam penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai dasar analisis selanjutnya yaitu berdasarkan teori manajemen mutu total yang digagas oleh Juran, yaitu perencanaan mutu, pelaksanaan mutu yang bersifat pengendalian, dan evaluasi yang bersifat peningkatan. Trilogi Juran merupakan penyempurnaan dari fungsi-fungsi manajemen yang dikembangkan oleh manajemen ilmiah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan lalu dihubungkan

⁴⁴ Yusuf Juniar Dewantara , *Evaluasi Kebijakan Program Pendidikan Inklusi di SDN Betet Kota Kediri*, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol 8 No.1 , Juni 2020, 1.

⁴⁵ Ali Roziqin, Irfan Murtadho Yusuf, *Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi : Studi Kasus di Universitas Diponegoro*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 8 No.2 , Desember 2019, 110.

dengan masalah yang akan menjadi focus dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto.

Konsep mutu yang diikuti oleh Juran adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Konsep Trilogi Juran

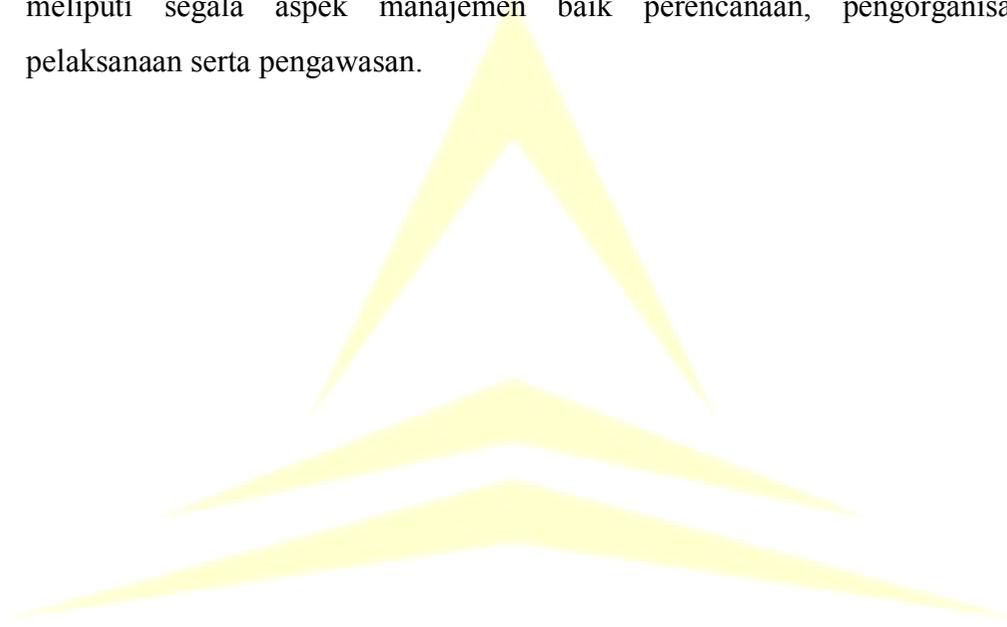
Dalam gambar ini Juran menggambarkan sebuah system manajemen mutu yang berkaitan antara perencanaan, pengendalian, dan perbaikan atau peningkatan kulaitas. Isi pokok perencanaan mutu ialah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelanggan, menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam progam kegiatan, dan menyusun langkah-langkah dalam proses pelaksanaan program untk menghasilkan sebuah produk.⁴⁶

Perencanaan merupakan menyusun langkah-langkah usaha yang dilakukan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi input IAIN Purwokerto, menetapkan Visi Misi, dan membuat kebijakan tentang pesantrenisasi. Pengendalian kualitas merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan. Proses yang dilakukan di IAIN Purwokerto meliputi kegiatan yang dilakukan Ma'had terkait Pesantrenisasi. Sedangkan peningkatan kualitas merupakan perbaikan kegiatan yang sudah dilakukan dan ditingkatkan kembali. Hal ini menyangkut output

⁴⁶ Mardan Umar, Feiby Ismail, *Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam* (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming dan Joseph Juran), *Jurnal Pendidikan Islam Iqra'* Vol 11 No. 2 (2017), 19.

mahasiswa IAIN Purwokerto harus mencapai standar kelulusan yang telah ditetapkan yaitu menguasai Standar Minimal Kelulusan yaitu BTA-PPI.

Bagi seorang administrator pendidikan, sebuah kebijakan yang merupakan hasil keputusan sangatlah penting diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap motivasi, komunikasi, kepemimpinan serta perubahan organisasi, kesalahan dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai dan diterapkannya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan yang merupakan tahap akhir dari proses perumusan kebijakan meliputi segala aspek manajemen baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif, sebuah system social yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi. Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna social. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada system makna pendekatan interpretative. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi social. Interpretif menyatakan situasi social. Interpretif menyatakan situasi social mengandung ambiguitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.⁴⁷

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.⁴⁸

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit social tertentu selama kurun waktu tertentu yang diarahkan sebagai upaya-upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena tertentu. Batas tertentu adalah adanya

⁴⁷ Muslim, *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal Wahana, Vol 1, No. 10, (2015/2016), 78-79.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Prenada Media Group 2009), 68.

batasan dalam hal waktu dan tempat serta batasan dalam hal kasus yang diangkat (dapat berupa program, kejadian, aktifitas, dan subjek penelitian.⁴⁹

Fokus penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan/mendeskripsikan Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan yang dilakukan peneliti sebagai data awal penelitian, dilakukan pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, sedangkan lokasi penelitian adalah Lembaga Ma'had IAIN Purwokerto.

Tabel 2
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Waktu	Posisi Informan	Informan
1	20 September 2019	Staff LPM IAIN Purwokerto	Rofina Dienasari,S.H.I
2	1 Oktober 2019	Mudzir Ma'had IAIN Purwokerto	KH. Nasruddin, M.Ag.
3	Selasa 25 Februari 2020	Staff Ma'had IAIN Purwokerto	Luthfie Mu'amar Z
4	Selasa 25 Februari 2020	Kepala bagian Administrasi dan Akademik	Fatkhurrozi, M.Kom
5	Senin, 11 Mei 2020	Rektor IAIN Purwokerto	Dr.K.H.Moh. Roqib, M.Ag
6	Jum'at, 15 Mei 2020	Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah	Dr. Supani, MA
7	Rabu, 24 Juni 2020	Admin SIMA Pondok pesantren Darul Falah	Siti Hanifatul Jannah

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta :Penerbit Salemba Humanika,2010), 76.

C. Subjek dan Obyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian dilakukan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Subyek penelitian ini adalah Kepala Ma'had IAIN Purwokerto, Admin IAIN Purwokerto, Rektor IAIN Purwokerto, TIM Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (yang terlibat awal mula berdirinya pesantrenisasi), Admin SIMA Pondok Pesantren. Obyek penelitian ini adalah data yang terkait program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁰ Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap peran ma'had IAIN Purwokerto terkait program pesantrenisasi. Jenis yang digunakan dalam observasi yaitu Participant charts yaitu peneliti melakukan observasi, merekam, mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek atau sejumlah subjek yang diobservasi secara simultan dalam suatu kegiatan atau aktifitas tertentu.⁵¹

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang dari dalam.⁵² Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara subyektif tentang bagaimana Manajemen Mutu Pendidikan melalui Program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto. Jenis yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung :Alfabeta, 2013), 308.

⁵¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta :Penerbit Salemba Humanika,2010), 137.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung :Alfabeta, 2013), 317.

yaitu peneliti melakukan Tanya jawab dengan pertanyaan yang telah disiapkan dengan jawaban yang tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan sesuai tema yang diteliti.⁵³

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁵⁴ Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui secara obyektif Progam Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto . Dokumentasi tersebut terdiri dari : dokumen rencana strategis, video awal terbentuknya program pesantrenisasi, dan foto-foto kegiatan yang terkait dengan program pesantrenisasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiyono mengatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Dalam penelitian ini, analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles dan Huberman, yang meliputi: (1) reduksi data, (2) display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

⁵³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta :Penerbit Salemba Humanika,2010), 123.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya: 2014), 217.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung :Alfabeta, 2013), 334.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan cara yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan melakukan uji silang terhadap data materi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.



BAB IV

KEBIJAKAN PROGRAM PESANTRENISASI DI IAIN PURWOKERTO

A. Kebijakan Program Pesantrenisasi

Kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tentunya dikemas dengan baik supaya keputusan tersebut bisa diterima oleh orang banyak. Kebijakan mutu perguruan tinggi yang ditetapkan berisi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh wewenang yang berpihak. Kebijakan awal mula pesantrenisasi yang terjadi di IAIN Purwokerto bermula kepemimpinannya Dr. Lutfie Hamidi, M.Ag, menjadi Ketua STAIN Purwokerto Tahun 2011, ada upaya mengatasi kegelisahan kaitannya mahasiswa STAIN yang diajar BTA /PPI dalam perkuliahan maka dalam itu disistimasi antara lain mengadakan workshop bagi yang belum lulus untuk di training sebanyak 35 x pertemuan atau 1 minggu dengan membayar sekitar 300.000, dan hasilnya kurang. lalu ada upaya untuk bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan seperti PMII, IMM, HMI, atau Masjid ketakmiran IAIN Purwokerto, namun mereka merasa keberatan akan tanggungjawab tersebut karena berbagai pertimbangan, akhirnya terbentuklah kerjasama yang namanya pesantrenisasi. Saat itu ketua STAIN Purwokerto memberikan kepercayaan kepada TIM Penjaminan Mutu atau yang disebut Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) yang diketuai oleh K.H. Moh. Roqib, M.Ag dan sekretarisnya yaitu Dr. Supani, M.A untuk membuat konsep dari awal bagaimana kelanjutan pesantrenisasi tersebut. Kemudian mengundang para pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan masukan-masukan lalu didiskusikan dan melibatkan beberapa orang untuk membuat pedoman peningkatan minimal kemampuan baca tulis al- qur'an dan praktek pengamalan ibadah. Dibentuklah sebuah TIM untuk menyusun modul awal dan model

pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengungkap kemahiran mahasiswa STAIN Purwokerto.⁵⁶

Jika dilihat dari kebutuhan lulusan IAIN Purwokerto ,program pesantrenisasi menjadi penting bahwa input mahasiswa IAIN Purwokerto 60 % dari kalangan umum SMA/SMK, kepentingan qur'an dan hadisnya belum terpenuhi. Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat berawal dari Dirjen Pendis pada waktu itu mengadakan kegiatan di Sulawesi Utara. Dalam kegiatan itu Dirjen tersebut mengumpulkan guru PAI untuk di test membaca surat al fatihah, pada saat itu ada yang belum terpenuhi sehingga memberikan warning kepada seluruh Rektor untuk melaksanakan test kepada stakeholder. Selain hal itu terdapat mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di suatu desa. Suatu hari mahasiswa tersebut disuruh untuk menjadi imam sholat atau pembacaan tahlil, dll, namun jawaban mahasiswa tersebut belum berani untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut menjadi penilaian masyarakat tersendiri bahwa mahasiswa IAIN Purwokerto belum berani untuk melakukan hal terbut padahal itu sudah menjadi ilmu yang sudah didapatkan di kampus.⁵⁷ Kondisi tersebut sudah berdampak buruk bagi citra lembaga yang disebabkan oleh munculnya complain dari stakeholder, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan yang lebih fatal adalah kondisi sesat dan menyesatkan sebagai akibat dari ketidakmampuan mahasiswa dalam penguasaan sumber ajaran agama Islam, Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Kekuatan IAIN Purwokerto terhadap program pesantrenisasi didasari dengan alasan didasarkan pada kebutuhan nyata bagi IAIN untuk standar minimal kompetensi Baca al-Qur'an bagi semua bagi perguruan tinggi Islam. Standarnya adalah bisa menulis al-Qur'an atau arab, bisa membaca dengan baik dan benar. Tulisannya juga baik dan benar. Lalu mengerti tentang bacaannya apa yaitu tajwid dan bacaannya, jika tulisannya berarti khotnya. Standar minimal orang mengerti peribadatan atrau ibadah mahdhoh mulai dari sholat, zakat, puasa

⁵⁶ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib. M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

⁵⁷ Data Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesatntren Darul Falah Kedungwuluh, Dr. Supani, M.A, Jum'at, 15 Mei 2020.

dan haji. Sholat bagaimana syarat rukunnya, didalamnya ada toharoh, ada pearawatan jenaza, dan manasik haji. Itulah yang dijadikan batas kemampuan minimal bagi semua lulusan perguruan tinggi agama, jangan sampai lulusan STAIN, IAIN tidak bisa adzan, mimpin sholat, jamaah dan lainnya.⁵⁸

Kata pimpinan ma'had sendiri beliau merasakan betapa manfaatnya program pesantrenisasi bagi calon sarjana IAIN Purwokerto. Program pesantrenisasi dilihat sangat penting karena input yang dirasakan sangat kurang terhadap standar BTA/ PPI yang tidak cukup setengah bulan penguasaanya, pembiasaan sholat berjamaah, beradaptasi dengan berbagai penjuru yang karakternya berbeda-beda, tidak hanya sebuah sertifikat tetapi maknanya jauh lebih penting, alumni IAIN Purwokerto tidak hanya memiliki nilai akademik yang bagus, tetapi nilai-nilai keagamaan yang melekat dan memiliki jiwa santri yang tinggi. Dengan bisa mempelajari ilmu alqur'an dan mempelajari ilmu-ilmu ibadah yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Selain data wawancara yang dilakukan penulis dengan pimpinan ma'had, penulis mempunyai data pendukung berupa dokumentasi dari LPPM (Lembaga Pengabdian dan Penjaminan Mutu). Dokumentasi tersebut berupa film pendek yang berisikan sejarah adanya progam pesantrenisasi. Rector STAIN Purwokerto pada saat itu adalah Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag dimana beliau mengatakan kebijakan awal progam pesantrenisasi dimulai pada awal tahun kepimpinannya tahun 2010/2011 yang berbunyi bahwa seorang mahasiswa baru IAIN Purwokerto angkatan Tahun 2010/2011 yang belum memenuhi kualitas lulus standar BTA PPI maka diwajibkan mukim minimal 1 tahun di Pondok Pesantren yang bekerja sama dengan IAIN Purwokerto. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa alumni IAIN Purwokerto belum bisa membaca al-Qur'an dengan fasih dan benar akibatnya *stakeholder complain*, masyarakat tidak percaya dengan kualitas keagamaan di IAIN Purwokerto dan terdapat mindset sesat menyesatkan. Semakin banyak mahasiswa IAIN Purwokerto berlatar

⁵⁸ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib. M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

⁵⁹ Data Wawancara dengan Pimpinan Ma'had IAIN Purwokerto, KH. Nasruddin, M.Ag. Senin, 15 Juni 2020

belakang pendidikan menengah umum dengan berasumsi pengetahuan dasar keagamaan mahasiswa semakin lemah, mahasiswa tidak dapat menguasai materi perkuliahan dengan cepat dan mudah, pengetahuan agama alumni berasal dari sumber sekunder. Dari kabar seperti itu muncul rasa ketidaknyamanan atau kekhawatiran yang mengakibatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri masyarakat yang menilai karena salah satu pelanggan yang merasakan kualitas alumni. Jika hal ini dibiarkan atau tidak dibenahi maka akan terjadi kesesatan yang mendalam dan terus menerus yang berfikir bahwa seorang alumni IAIN pada dasarnya harus bisa membaca al-Qur'an secara baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Alqur'an sebagai salah satu pedoman hidup seorang muslim salah memahami, salah membaca, salah mentransfer kepada orang lain maka akibatnya akan fatal.⁶⁰

Dari beberapa para Kyai atau pesantren yang telah berdiri mengatakan di antaranya :

1. Drs. H. Khariri, M.Ag (alm), (Pimpinan Ponpes Darussalam) mengatakan “seorang sarjana harus wajib bisa dan betul-betul menguasai, memahami dan membaca kitab suci alqur'an, dan tajwidnya, menghafal beberapa surat, meskipun tidak panjang karena suatu saat mereka akan menjadi seorang khotib, imam sholat atau pembicara. Selain bisa membaca juga harus bisa menulis”.
2. K.H. Ma'mun Al-Kahfi Al Hafidz, SHI (Pimpinan Ponpes Al Husaini) mengatakan “ bacaannya benar sesuai ilmu tajwid, minimal hafal juzz amma”.
3. Drs. H.M. Mukti, M.Pd.I (Pimpinan Ponpes Al Amin) mengatakan “ harus bisa paham terkait Praktek Pengalaman Ibadah seperti rukun islam, praktek sholat”.
4. Drs. K.H. Mughni Labib, M.Si (Pimpinan Ponpes Al Ittihad) masalah fiqih, ibadah, thoharoh, tayamum, sholat jenazah, wudhu.⁶¹

⁶⁰ Data Dokumentasi berupa Video dari LPM IAIN Purwokerto, 20 September 2019

⁶¹ Data Dokumentasi berupa Video dari LPM IAIN Purwokerto, 20 September 2019

Visi dan Misi kerja sama IAIN Purwokerto dan Pesantren Mitra diantaranya :

1. Meningkatkan kompetensi dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).
2. Mempersiapkan pribadi muslim yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkhidmat pada agama, masyarakat dan Negara.
3. Mempersiapkan kader ulama /sarjana yang kompeten di bidang agama dan umum serta konsisten di dalam menjaga tradisis salaf shalih.

Kebijakan program pesantrenisasi dari tahun ke tahun ada perubahan, seiring mengikuti perkembangan zaman sebagai peningkatan kebutuhan keilmuan.

“Setiap tahun ada perubahan, walaupun tidak menyolok, misalnya dulu 6 bulan (setengah tahun) menjadi 1 bulan, tetapi dari biaya tetap sama yaitu 300 rb, dan buku panduan.perubahanya incidental sesuai dengan kebutuhan keilmuan. Dulu ada upaya jika tidak lulus 1 semester dinaikkan biar cepat lulus misalkan semester 2 (400 rb) dinaikkan, tetapi belum direalisasikan karena kasihan sebgaian dari mahaiswa malas-malasan yang tidak lulus kategori tidak mampu dalam hal ekonomi, dari pada membebani banyak akhirnya biayanya 300 rb. Perubahan misalkan kaitan dengan buku panduan ada upaya untuk test online, pengelompokan pada mereka yang semester atas yang ngga lulus-lulus ada treatment tertentu dengn kerjasama dengan pesantren tertentu untuk menuntaskan hal tersebut. Perubahannya tidak tiap tahun tetapi ini incidental sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada untuk peningkatan keilmuan.” (Wawancara Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Muh. Roqib, M.Ag)⁶²

B. Komitmen Pimpinan Terhadap Program Pesantrenisasi

Dalam pandangan Deming dan Crosby, komitmen semua pihak rerutama pimpinan adalah prinsip pertama dalam usaha peningkatan mutu. Komitmen yang dimaksud disini adalah komitmen untuk mengembangkan PT bermutu. Dalam konteks ini, komitmen mengandung pengertian : sadar tentang sesuatu yang terbaik atau bermutu, berani mengambil keputusan yang objektif untuk mencapainya, berjanji (kepada diri sendiri, masyarakat dan tuhan) untuk

⁶² Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib. M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

melaksanakan keputusan itu, serta berani melaksanakan keputusan itu dengan sungguh dan jujur. Tanpa adanya komitmen semua pihak secara terpadu, terutama para pemimpin pembangunan bangsa dan Negara, termasuk pembangunan PT, sangat sulit untuk membuahkan hasil yang bermutu. Karena itu, kondisi untuk membudayakan komitmen sangat perlu diciptakan dan dikembangkan.⁶³

Komitmen yang dilakukan oleh Pimpinan IAIN Purwokerto terhadap program pesantrenisasi adalah membangun kerjasama antar pondok pesantren yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang belum bisa menuntaskan kewajiban Standar BTA/PPI. Upaya kerjasama yang dilakukan IAIN Purwokerto dengan pondok pesantren, mendapat kekuatan dengan keluarnya Instruksi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.J/Dr.I.IV/PP.00.9/2374/2014, tertanggal 30 September 2014, tentang Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had Al-Jami'ah) yang ditujukan kepada para Rektor /Ketua PTKIN dan Koordinator Kopertais Wilayah 1 s.d XIII.⁶⁴

Keberhasilan dari kerjasama dapat dicermati dari pengembangan indikator melalui pendekatan manajemen program, seperti *pertama*, indikator input. Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu : terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan dalam kerjasama, adanya sumber dana/biaya, yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kerjasama, adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. *Kedua*, indikator proses. Tolak ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai kualitas pertemuan tim atau sekretariat sesuai kebutuhan. Hasilnya dapat dilihat dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan. *Ketiga*, indikator output. Tolak ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut : jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi.

⁶³ Daulat P. Tampubulon, *Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke- 21* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 103-104

⁶⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had Al-Jami'ah) yang ditujukan kepada para Rektor /Ketua PTKIN dan Koordinator Kopertais Wilayah 1 s.d XIII*, Jakarta 30 September 2014.

Kedekatan IAIN Purwokerto dengan pondok pesantren sudah terjalin ketika kedua lembaga tersebut ada. Sebab kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan mengkaji Ilmu Keislaman dan setiap pesantren memiliki penekanan atau khas masing-masing pondok pesantren.

“Sebenarnya kerja sama IAIN dengan pondok pesantren sudah lama, hanya saja kerja sama tersebut belum diresmikan secara formal, hingga akhirnya turunlah MoU untuk meresmikan sebagai pesantren mitra IAIN Purwokerto.” (Wawancara Dr. Supani, M.A).⁶⁵

Ada kompetisi positif antar pesantren, karena yang menentukan kelulusan hasil mahasiswa selama belajar di pesantrennya adalah pihak STAIN/IAIN, sehingga pesantren tentu akan berupaya memberikan pengajaran terbaik bagi santri mahasiswanya sehingga mereka lulus. Ini mendorong pesantren untuk melakukan proses pengelolaan pembelajarannya lebih serius. *Ketiga*, pesantren yang sebelumnya berada dipinggiran Purwokerto saat ini tumbuh dan muncul di tengah kota.

Kerja sama yang memberikan semangat bagi para pengasuh pesantren, hal ini bisa disikapi oleh pihak Mudzir Ma’had IAIN Prwokerto dapat mengembangkan beberapa paket kemudian meningkatkan kegiatan-kegiatan yang lebih inovasi, tidak hanya sekedar penguasaan Standar BTA-PPI seperti penguatan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris, penguatan kajian kitab-kitab turost sehingga keilmuan mereka dapat menguasai dan membaca kitab-kitab kuning. Selain hal itu pesantren dapat dijadikan sebagai laboratorium pengembangan keagamaan bagi mahasiswa IAIN Purwokerto.⁶⁶

Pesantrenisasi tidak hanya sekedar pesantren sebagai lambang nama saja, tetapi dari pimpinan memastikan bahwa pesantren menjalankan tugasnya sebagai tempat untuk mengaji dan belajar. Yang dilakukan pimpinan ma’had meliputi mensurvey tempatnya, seperti Sarana Prasarana, Tempat Belajarnya, Dewan Pengajarnya, terdapat seseorang yang bisa bertempat tinggal (stay) dipesantren

⁶⁵ Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Dr. Supani, M.A, Jum’at, 15 Mei 2020.

⁶⁶ Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib, M.A, Selasa 11 Mei 2020.

tersebut (ada yang menjaga) atau orang yang dituakan untuk memimpin pesantren tersebut. Pesantren harus melaksanakan kerja sama sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang diajukan adalah sebagai berikut : pesantren sudah memiliki ijin operasional, mempunyai nomor statistic yang dikeluarkan oleh Kemenag, struktur kepengurusan, jumlah santri, dewan ustadz dan ustadzah, dan kurikulum pondok pesantren⁶⁷

Pesantren yang bermitra dengan IAIN harus didasarkan pada MoU dengan ketentuan dasarnya. Ketentuan dasarnya adalah pesantren harus sudah memiliki ijin operasional, mempunyai nomor statistic yang dikeluarkan oleh Kemenag dan bersedia mengikuti aturan teknis yang ditentukan oleh ma'had IAIN Purwokerto.⁶⁸

Pada tahun ini, jumlah pesantren yang telah MoU dengan IAIN Purwokerto sebanyak 30 pesantren yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Data Pesantren Mitra IAIN Purwokerto

No	Nama Pesantren	Alamat	Pengasuh
1	Ath Thohiriyyah	Jl. KS. Tubun Gg Masjid No 31 Parakan Onje, Karangsalam Kidul, Purwokerto	KH. Muhammad Thoha 'Alawy al Hafidz
2	Darussalam	Jl. Sunan Bonang No. 37 rt 3 rw 4 Dukuh waluh, Kembaran, Bnayumas	Dr. KH. Chariri Shofa, M.Ag
3	Al Amin Pabuaran	Jl. Prof. Dr. Hr. Boenyamin Gn. Sindoro No 13 A, Pabuaran, Purwokerto Utara	Drs. KH. Ibnu Mukti, M.Pd.I

⁶⁷ Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Dr. Supani, M.A, Jum'at, 15 Mei 2020.

⁶⁸ Wawancara dengan Mudzir Ma'had IAIN Purwokerto, K.H. Nasruddin, Selasa, 19 Mei 2020.

No	Nama Pesantren	Alamat	Pengasuh
4	Al Amin Purwokerto Wetan	Jl. Martadireja II Rt 4 Rw 1 Purwokerto Wetan	Drs. Chabib Makiki
5	Al Hidayah Karangsucu	Let. Jend. Pol. Soemarto Kel. Purwonegara, Kec. Purwokerto Utara	Nyai. Hj. Dra. Nadhiroh Noeris
6	Al Husaini	Jl. KS. Tubun Gg Kurma Rt 3 Rw 7 Kel. Rejasari, Kec. Purwokerto Barat	KH. Ma'mun Al- Kahfi Al-Hafidz, S.H.I., M.SI.
7	Al Ikhsan Beji	Jl. Satria Beji I, Kedung Banteng, Bnayumas	Kyai. Achmad Shodiq Mukhtar Idris, A.H.
8	Al Ittihad	Jl. KH. Ach. Sa'adulloh Majdi, Rt 3 Rw 2, Pasir Kidul	KH. Drs. Mughni Labib, M.S.I.
9	Darul Abror	Jl. Let. Jend. Pol. Soemarto Gg XIV Purwanegara, Purwokerto Utara	Kyai Taufiqurrohman
10	Fatkhul Mu'in	Jl. Kebocorang Gg Gagak Karangsalam Kidul Rt 2 Rw 2 Kedung Banteng	K.H. Nasruddin, M.Ag.
11	Fathul Huda	Jl. Jendral Soeprapto Gg IV No 27 Kebon dalem, Kel Purwokerto Lor	KH. Drs. Rachmat Burhani dan Ibu Nyai Tri Rachmijati, S.Ag., M.Pd.
12	Nurul Iman	Desa Pasir Wetan Rt 3 Rw 2 Kec. Karangluwas	KH. M. Thohirin AZM
13	Nurus Syifa	Jl. Serayu Raya No 23, Perumahan Sumampir	Drs.Ahmad Muhaimin Mu'in

No	Nama Pesantren	Alamat	Pengasuh
		Indah, Purwokerto Utara	
14	Roudhotul Ulum	Jl. Kmandaka, Karang Salam Kidul Rt 3 Rw 4, Kec. Kedung Banteng	Ky. Ahmad Nailul Basith
15	Darul Falah	Jl. Pemuda Gg 1 No 61 Kedungwuluh Purwokerto Barat	Dr. K. Supani, M.A
16	Zam-Zam	Jl. Tentara Pelajar No 41-43 Kel. Kedungwuluh Purwokerto Barat	Ust. Dr. H. Muh. Hizbul Muflihin, BA., M.Pd
17	El Fira	Jl. Ahmad Yani Gg VII No. 34 Kebon Bayem Purwanegara	Dr. KH. Fathul Aminuddin Aziz., M.M.
18	Roudhotul Qur'an 2	Jl. Raya Karanggintung Ciwarak Rt 1 Rw 3 Sumbang Banyumas	KH Drs Atabik Yusuf Zuhdi & Ny. Hj Nur Sochifah Mufid Mas'ud Al Khafidzoh
19	Sirojudin	-	-
20	Anwarul Hidayah	Jl. Lingkar Utara Rt 3 Rw 1 Desa Karangangka Kec. Kedung Banteng	Kyai Muslimin Samani
21	Hidayatul Muftadien	Jl. Bersole Rt 01 Rw 07	Kyai Nururrohman
22	PESMA An Najah	Jl. Moh. Besar Kutasari Baturraden	Dr. K. H. Mohammad Rooqib, M.Ag.
23	Bani Rosul	Jl. Radji Mustofa Rt 1 Rw 4 Bantarsoka Purwokerto Barat	KH. R. Zaenurrohman al-Hafidz

No	Nama Pesantren	Alamat	Pengasuh
24	Manbaul Husna	Jl. Pol. Soemarto Gg Gunung Argopuro Rt 6 Rw 4 No 26 Watumas Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara	Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag
25	PESMA Ulul Albab	Jl. Serayu Raya No. 15 Rt 10 Rw 2 Kel. Sumampir Purwokerto Utara	Dr. H. RIDWAN, M.Ag
26	Ma'had Al- Jamia'ah	IAIN Purwokerto	-
27	PON-PES NU 'Abdul Djamil	Jl. Suteja No. 32 RT: 03/07 Kel. Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Banyumas (Alamat Pesantren Pusat : Kauman, Rt 06 /1, Sokaraja Tengah)	KH. Muhammad Baihaqi, BA
28	Pondok Pesantren Darul Hikmah Bobosan	Jl. Kamandaka GG. Rinjani Rt 08 Rw 03 Bobosan Purwokerto Utara Banyumas	Kyai Mustofa Al Hafidz
29	P.P.M El- Furqon	Jl. Let. Jjend. Pol. Sumarto GG I Kelurahan Purwanegara	Ust. Ahmad Zayyadi, MA., MHI. 2. Ust. Sarmo, SHI., MHI.
30	As- Sidah	Jl. Rajawali Rt 01 Rw 02 Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas	-

Sumber : <http://sima.iainpurwokerto.ac.id/datapesantren.php>

Dari ke 30 pondok pesantren tersebut Ma'had Jami'ah IAIN Purwokerto tidak langsung terjun sendirian, tetapi bekerja sama dengan pengasuh masing-masing dan dibantu menggunakan system teknologi yang disebut system SIMA (Sistem Informasi Ma'had Al-jami'ah). Sistem ini dibuat bertujuan untuk mengontrol kondisi pondok pesantren mitra IAIN Purwokerto yang mencakup sejarah awal berdirinya pondok pesantren, program pondok pesantren, kitab yang diajarkan, data santriwan atau santriwati, data ustadz atau ustadzah yang mengajar, Pendaftaran santri baru, dan yang paling utama adalah informasi terkait ujian dan hasil BTA-PPI. Setiap pondok pesantren mitra wajib mempunyai 1 orang untuk dijadikan admin SIMA dari pengurus yang ditunjuk pengasuhnya.⁶⁹

Kerjasama IAIN Purwokerto bisa terjadi dengan alasan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana IAIN Purwokerto dalam pendidikan dan pengajaran BTA-PPI mengakibatkan tuntas BTA-PPI bagi mahasiswa tidak bisa dilaksanakan secara optimal, mahasiswa tidak mampu menguasai keilmuan keislaman secara matang, banyak alumni yang belum tuntas BTA-PPI. Awal terjadinya program pesantrenisasi tentunya terjadi kontra dari beberapa mahasiswa dan ada yang demo. Mereka berasumsi bahwa kehidupan dalam pesantren seperti penjara dimana harus menaati sedemikian rupa apalagi yang notabene belum pernah mukim di pondok sebelumnya tentunya berat. Lambat laun dengan jiwa nekad dan terpaksa mereka mau mengikuti program itu. Pada awal tahun 2010/2011 STAIN bermitra dengan 10 Pondok Pesantren. Santri yang menetap selama satu tahun di Pondok Pesantren dan mengikuti Ujian BTA-PPI, tingkat kelulusannya lebih dari 68 persen. Santri yang telah menetap selama satu tahun di Pondok Pesantren Mitra lebih dari 60 persen masih terus menetap di pesantren. Pada tahun 2011/2012 STAIN bermitra dengan 15 Pondok Pesantren. Pada tahun 2013/2014 STAIN bermitra dengan 17 Pondok Pesantren. Pada tahun 2014/2015 STAIN bermitra dengan 19 Pondok Pesantren. Pada tahun 2015/2016

⁶⁹ Data Wawancara dengan Pimpinan Ma'had IAIN Purwokerto, KH. Nasruddin, M.Ag. Senin, 15 Juni 2020.

STAIN bermitra dengan 22 Pondok Pesantren. Pada tahun 2016/2017 sampai sekarang STAIN bermitra dengan 30 Pondok Pesantren.⁷⁰

C. Peran Lembaga Ma'had Terhadap Program Pesantrenisasi

UPT Ma'had Al-Jamiah merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk mengawal dan menjamin kualitas seluruh mahasiswa IAIN Purwokerto dari segi kemampuan Baca Tulis Al- Qur'an dan Pengetahuan dan Pengamalan Ibadah (BTA-PPI). Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan "Program Pesantrenisasi". Program pesantrenisasi adalah program unggulan yang menjadi kekhasan IAIN Purwokerto. Dalam program ini mahasiswa yang tidak lulus BTA-PPI pada saat ujian masuk maka wajib tinggal dipesantren mitra selama 1 tahun untuk mematangkan kemampuan BTA-PPI.⁷¹

Dalam Instruksi Dirjen Pendis menyebutkan, bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan Ma'had al-Jami'ah dimaksud, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, pola penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* dilakukan secara kreatif dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan melibatkan *stakeholders* perguruan tinggi. *Kedua*, penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* dapat dilaksanakan dengan menggunakan satu diantara beberapa model, yaitu : (a) Pesantren Penuh, yaitu Ma'had al-Jami'ah yang menampung seluruh mahasiswa baru seperti telah terlaksana di beberapa UIN/IAIN/STAIN, (b) Semi Pesantren atau Pesantren Mitra, model ini dilaksanakan dengan melibatkan potensi masyarakat di luar kampus seperti pesantren, kos-kosan mahasiswa, dan sebagainya, (c) Gabungan antara model a dan b, atau model lain yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Ketiga, fungsi yang diharapkan muncul dari Ma'had al-Jami'ah adalah untuk : memperkuat dasar-dasar dan wawasan keagamaan dan keislaman, memperkuat kemampuan bahasa asing (Arab, Inggris, lainnya), membentuk

⁷⁰ Data Dokumentasi berupa Video dari LPM IAIN Purwokerto, 20 September 2019.

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Test BTA-PPI* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 2

karakter (*character building*), menjadi pusat pembinaan tahsin dan tahfidzul qur'an, mengembangkan ketrampilan dan tradisi akademik lainnya.

Keempat, terkait dengan kurikulum Ma'had al-Jami'ah, disebutkan bahwa minimal materi yang dibelajarkan terdiri atas : kompetensi dasar, ketrampilan membaca dan menulis al-qur'an, ketrampilan ibadah dan penguasaan dasar-dasar pelaksanaan ubudiyah, ketrampilan berbahasa asing (Arab dan Inggris), ketrampilan memahami khazanah keislaman (kitab kuning), kompetensi penunjang/lainnya. Selain kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin di atas perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Kelima, masa penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* minimal 1 (satu) tahun. Kelulusan pada program *Ma'had al-Jami'ah* menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah tertentu dan atau pelaksanaan akademik lainnya.

Keenam, penganggaran penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* dilaksanakan secara terintegrasi dengan penganggaran perguruan tinggi. PTKIN yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), penganggaran *Ma'had al-Jami'ah* mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PTKIN yang menerapkan pengelolaan keuangan non-BLU, *Ma'had al-Jami'ah* dapat dianggarkan melalui perhitungan biaya UKT.BKT.⁷²

Sebagai lembaga ma'had yang berkontribusi terhadap program pesantrenisasi dengan menjalankan tugas pokok yang telah ditetapkan. Kontribusi atau peran lembaga ma'had terhadap pesantrenisasi yang paling pokok terdapat 2 kegiatan yaitu Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an dan Pelaksanaan Test Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).⁷³

1. Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an.

Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an merupakan program yang dilaksanakan oleh ma'had terhadap pesantren dimana program tersebut dilaksanakan di

⁷² Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had Al-Jami'ah) yang ditujukan kepada para Rektor /Ketua PTKIN dan Koordinator Kopertais Wilayah 1 s.d XIII*, Jakarta 30 September 2014.

⁷³ Wawancara dengan staff ma'had IAIN Purwokerto, Lutfie Mu'amar Z, Senin, 13 Juli 2020.

pondok pesantren mitra IAIN Purwokerto. Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada mahasiswa IAIN Purwokerto dalam bidang Tahfidz Al-Qur'an dan kemampuan baca tulis alqur'an dan pengetahuan pengamalan ibadah. Mahasiswa baru akan dibimbing oleh kiai dan ustadz selama satu tahun minimal juz 30 dan mendapatkan pengetahuan tentang baca tulis alqur'an dan pengetahuan pengalaman ibadah selama mukim di pesantren. Diharapkan dari pembinaan tahfidz al qur'an dapat mencetak generasi tahfidz alqur'an dan mencapai standar kompetensi baca tulis alqur'an dan pengetahuan pengamalan ibadah. Program ini dibebankan kepada dana DIPA IAIN Purwokerto Tahun Anggaran dengan Surat Keputusan Rektor No. 1237 Tahun 2019 Tanggal 1 September 2019 dengan honorarium sebesar Rp. 40.000/mahasiswa/bulan. Pelaksanaan dana honorarium Pembina/pembimbing tahfidz Al-Qur'an dilakukan dengan penjumlahan jumlah mahasiswa yang mukim pada pondok pesantren mitra. Waktu pemberian honorarium untuk ustadz dibayarkan mulai bulan September-Desember 2019.⁷⁴

Dalam menjalankan pembinaan tahfidz alqur'an di dalam pesantren, yang telah menjadi kurikulum bagi pesantren mitra IAIN Purwokerto mengacu pada dasar hukum yang telah ditetapkan. Landasan hukum pedoman kurikulum pendidikan di pondok pesantren yang menjadi mitra bagi IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁷⁴ Wawancara dengan staff ma'had IAIN Purwokerto, Lutfie Mu'amar Z, Senin, 13 Juli 2020.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
- g. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.
- i. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Purwokerto.
- j. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 048 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Martikulasi kompetensi dasar baca tulis Al-Qur'an (BTA) serta pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- k. MoU kerjasama IAIN Purwokerto dengan pondok pesantren mitra.
- l. SK Rektor IAIN Purwokerto Nomor Tahun 2017 Tentang Pedoman Kurikulum pendidikan di pondok pesantren mitra IAIN Purwokerto.⁷⁵
Kurikulum pendidikan pondok pesantren mitra merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tujuan program pesantrenisasi yang ada di IAN Purwokerto. Pengembangan kurikulum pendidikan pondok pesantren mitra memperhatikan beberapa hal :
 - a. Kesepakatan antara pihak IAIN Purwokerto dan pondok pesantren mitra dalam pengembangan kurikulum program BTA-PPI.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Mitra Dengan IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 2-3

- b. Hasil survey lapangan yang menunjukkan bahwa kebutuhan lulusan IAIN Purwokerto yang dituntut untuk memiliki kualifikasi keilmuan agama yang dapat dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat.
- c. Kesesuaian dengan renstra perguruan tinggi (visi, misi, tujuan ,strategi).
- d. Harus didukung oleh eksistensi sumber daya yang dimiliki antara lain sumber daya manusia serta sarana prasarana.⁷⁶

Pedoman Pengembangan Kurikulum Pesantren Mitra merupakan acuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di pesantren mitra. Kebijakan materi yang telah disepakati di awal meliputi tadhrib (fiqih), Modul BTA-PPI, Akhlaq dan Hafalan Juz 30 penuh. Dan tambahan materi yang lain disesuaikan dengan ciri khas pesantren mitra masing-masing.⁷⁷ Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Rincian Materi Pembelajaran di Pesantren Mitra IAIN Purwokerto

No	Materi	Pembahasan
1	Imla'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Imla' 2. Tujuan Imla' 3. Macam-macam Imla' 4. Metode Pembelajaran Imla'
2	Mengenal Huruf Hijaiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Huruf Hijaiyah 2. Huruf yang Bisa Disambung dan Bisa Mmenyambung 3. Huruf yang Bisa Disambung dan Tidak Bisa Mmenyambung 4. Penempatan Huruf Di Awal, Tengah dan Akhir. 5. Penulisan Huruf.

⁷⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Mitra Dengan IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 6-7

⁷⁷ Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Dr. Supani, M.A, Jum'at 15 Mei 2020.

No	Materi	Pembahasan
3	Kaidah-Kaidah dalam penulisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan Taa Marbuuthah dan Taa Maftuhah 2. Penulisan Hamzah 3. Penulisan Alif Layyinah 4. Latihan Penulisan Surat Pendek
4	Kaidah Ilmu Tajwid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Ilmu Tajwid dan Fungsinya 2. Makharijul Huruf 3. Sifat-Sifat Huruf 4. Macam-Macam Hukum Bacaan 5. Fawaatihush Shuwar 6. Bacaan dan Tanda Tertentu 7. Bacaan Gharib dalam Al-Qur'an
5	Thaharah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Umum Thaharah 2. Air dan Macam-macamnya 3. Najis 4. Wudhu 5. Mandi 6. Tayammum
6	Shalat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk Pelaksanaan Sholat 2. Shalat-shalat Sunnah 3. Shalat Berjama'ah 4. Qashar dan jamak dalam shalat 5. Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah
7	Jenazah dan Perawatannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang Harus Dilakukan terhadap Mayat (Jenazah) 2. Perawatan Jenazah
8	Puasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puasa dan Tatacaranya 2. Macam-Macam puasa 3. HukumHukum Khusus Dalam Puasa

No	Materi	Pembahasan
9	Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi 2. Macam-Macam Zakat 3. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat 4. Orang-orang yang tidak Berhak Menerima Zakat 5. Doa Mengeluarkan dan Menerima Zakat
10	Haji dan Umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Haji dan Umrah 2. Beberapa Istilah dalam Ibadah Haji dan Umrah 3. Tatacara Haji dan Umrah 4. Haji Bagi Wanita 5. Haji Badal
11	Qiraatul Kutub	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tadzhib 2. Matan Jurumiyah

2. Pelaksanaan Test Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Pelaksanaan Test Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) merupakan bagian usaha guna mengukur tingkat keberhasilan program pesntrenisasi. Hal ini merupakan tanggungjawab besar bagi UPT. Ma'had al Jami'ah dalam menjaga kualitas lulusan dari IAN Purwokerto agar benar-benar menjadi alumni yang siap berkiprah dimasyarakat secara maksimal terutama dalam kemampuan ibadah dasar dan harian. Pelaksanaan Test Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dilaksanakan di IAIN Purwokerto sesuai jalur yang diambil oleh mahasiswa baru yaitu jalur SPAN, UMPTKIN, dan jalur

Mandiri. Biaya pelaksanaan ujian tersebut dibebankan kepada PNBPN dengan rincian perjalur sebagai berikut :⁷⁸

Tabel 5
Biaya Pelaksanaan Ujian Mahasiswa Baru IAIN Purwokerto yang dibebankan kepada PNBPN

No	Jalur	Belanja Bahan	Belanja Honor Output Kegiatan	Total
1	SPAN	2.235.000	42.450.000	44.685.000
2	UMPTKIN	5.271.000	71.350.000	76.621.000
3	Mandiri	58.830.000	48.050.000	106.880.000

Pelaksanaan Test Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) sebagai alat ukur atau evaluasi kurikulum pesantren mitra IAIN Purwokerto. Landasan hukum pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.

⁷⁸ Wawancara dengan staff ma'had IAIN Purwokerto, Lutfie Mu'amar, Senin, 13 Juli 2020.

- h. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Purwokerto.
- i. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 761 tahun 2017 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Purwokerto.

Adapun pelaksanaan test ujian BTA-PPI terdapat penyusunan test BTA-PPI yang sudah tercantum dalam Buku Pedoman Penyusunan Test BTA-PPI IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Penyusunan Test BTA-PPI

Penyusunan Ujian BtA-PPI terbagi kedalam dua bagian, yaitu ujian tulis dan ujian lisan. Ujian yang masuk dalam kategori ujian tulis untuk materi BTA adalah hafalan, tajwid sementara semua materi PPI yang dalam bentuk teori dibuat dalam bentuk ujian tulis. Materi ujian lisan untuk BTA adalah praktek tartil (membaca al-Qur'an) ayat pilihan, umumnya ayat yang memiliki fawatihus shuwar. Menguji hafalan surat-surat pilihan dari juz 30 dan ujian Imla. Sementara materi PPI yang diujikan biasanya berupa materi fiqih yang memang harus dipraktikkan seperti wudhu, tayammum, mandi besar, praktek shalat, praktek shalat jamak-qashar, praktek sholat jenazah dan lain-lain.

b. Alur pembuatan Test BTA-PPI

Adapun alur pembuatan Test BTA-PPI adalah sebagai berikut :

- 1) Mudir ma'had mengusulkan tim penyusun test BTA-PPI kepada rector
- 2) Mudir ma'had meberikan arahan dan pembagian dalam penyusunan soal ujian BTA-PPI
- 3) Tim melaksanakan penyusunan soal ujian BTA-PPI
- 4) Setelah soal selesai disusun lalu dilayout dan dilakukan proses editing
- 5) Hasil dari penyusunan test BTA-PPI itu kemudian masih direvisi untuk dipastikan tanpa kesalahan.
- 6) Kemudian naskah ujian BTA-PPI itu divalidasi oleh pakar.
- 7) Setelah ada masukan dari pakar dilakukan revisi ulang

- 8) Setelah naskah ujian jadi dan proses editing dan revisi selesai baru dilaksanakan pencetakan dan penggandaan soal ujian BTA-PPI.⁷⁹

Pelaksanaan test BTA-PPI dilaksanakan oleh mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di IAIN Purwokerto. Mahasiswa baru akan diuji oleh dosen yang sudah ditetapkan sebagai standar penguji BTA-PPI yang sudah di SK kan oleh rector⁸⁰. Berikut keputusan rector IAIN Purwokerto Nomor 791 Tahun 2019 tentang “Pangkatan Penguji Ujian BTA dan PPI IAIN Purwokerto Tahun 2019”.

Tabel 6

Pangkatan Penguji Ujian BTA dan PPI IAIN Purwokerto Tahun 2019

No	Nama	Fakultas
1	Dr. H. Khariri, M.Ag	FS
2	Drs. Zaenal Abidin, M.Pd	FD
3	Dr. H. Rohmad, M.Pd	PPS
4	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag	PPS
5	Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag	FTIK
6	Dr. H. Syufa'at, M.Ag	FS
7	Dr. Subur, M.Ag	FTIK
8	Dr. H. Naqiyah, M.Ag	FUAH
9	Dr. H. Suraji, M.Ag	FS
10	Dr. Fauzi, M.Ag	FTIK
11	Dr. Nawawi, M.Hum	FD
12	Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag	PPS
13	Dr. H. Munjin, M.Pd.I	FTIK
14	Dr. H. Ansori, M.Ag	FS
15	Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag	FD
16	Dr. H. Ridwan, M.Ag	FS

⁷⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Test BTA-PPI* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 5-6

⁸⁰ Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Dr. Supani, M.A, Jum'at 15 Mei 2020.

No	Nama	Fakultas
17	Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag	FEBI
18	Dr. Asdlori, M.Pd.I	FTIK
19	Drs. H. Yuslam, M.Pd	FTIK
20	Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I	FTIK
21	Drs. Atabik, M.Ag	FEBI
22	Dr. H.M. Hizbul Mufkihin, M.Pd	FTIK
23	Dr. H. Fathul Aminudin A, MM	FEBI
24	Dr. Sulkhan Chakim, MM	FD
25	Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag	FEBI
26	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, S.Ag, M.Pd	PPS
27	Dr. H. Suwito, M.Ag	FTIK
28	Dr. Sumiarti, M.Ag	FTIK
29	Dr. Kholid Mawardi, M.Hum	FTIK
30	Dr. Hj. Ida Novianti, M.Ag	FUAH
31	Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I	FTIK
32	Iin Solikin, M.Ag	FEBI
33	H.A. Sangid, B.Ed. MA	FTIK
34	Nasrudin, M.Ag	FUAH
35	Drs. H. Sangidun, M.Si	FD
36	H. Siswadi, M.Ag	FTIK
37	Dr. Muskinul Fuad, M.Ag	FD
38	Dr. Suparjo, MA	FTIK
39	Toifur, S.Ag, M.Si	FD
40	Dr. Rohmat, M.Ag. M.Pd	FTIK
41	Enung Asmaya, MA	FD
42	Dr. H.M. Slamet Yahya, M.Ag	FTIK
43	Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I	FEBI
44	Dr. M.Misbah, M.Ag	FTIK

No	Nama	Fakultas
45	Dr. Supani, M.A	FS
46	Sony Susandra, M.Ag	FTIK
47	Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag.	FUAH
48	H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I	FS
49	Mawardi, M.Ag	FS
50	Muridan, M.Ag	FD
51	H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag	PPS
52	Waliko, M.A	FUAH
53	Dr. Elya Munfarida, M.Ag	FUAH
54	Nur Fuadi, M.Pd.I	FTIK
55	Muhammad Nuhlim, M.Pd	FTIK
56	Sochimin, M.Si	FEBI
57	Uus Uswatusolihah, MA	FD
58	Dr. Musta'in, M.Si	FD
59	Agus Sunaryo, M.S.I	FS
60	Dr. Maria Ulpah, M.Si	FTIK
61	Dwi Priyanto, M.Pd	FTIK
62	Arsam, M.S.I	FD
63	Durrotun Nafisah, M.S.I	FD
64	Dr. Munawir, M.S.I	FUAH
65	Ahmad Muttaqin, M.Si	FD
66	Hariyanto, M.Hum	FS
67	Ali Muhdi, M.S.I	FTIK
68	Nurma Ali Ridwan, M.Ag	FD
69	H.Mukhroji, M.S.I	FTIK
70	Rahman Afandi, M.S.I	FTIK
71	Tri Rachmajati, M.Pd.	FTIK
72	H. Afif Muhammad, M.A	FS

No	Nama	Fakultas
73	Dr. H.M. Safwan M, M.A	FUAH
74	Nur Azizah, M.Si	FD
75	Farah Nuril Izza, M.A	FUAH
76	Dewi Laela Hilyatin, M.S.I	FEBI
77	M.A Hermawan, M.S.I	FTIK
78	Dony Khoedul Aziz, M.Pd	FTIK
79	Abu Dharin, M.Pd	FTIK
80	Umi Halwati, M.Ag	FD
81	Bani Syarif Maula, M.Ag	FS
82	Muhammad Hanif, M.Ag, M.Pd	FUAH
83	Ade Ruswatie, S.Pd., M.Pd	FTIK
84	Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd	FTIK
85	Ischak Suryo Nugroho, M.S.I	FTIK
86	Mawi Khusni Albar, M.Pd.I	FTIK
87	Muhammad Sholeh, M.Pd.I	FTIK
88	Fahri Hidayat, M.Pd.I	FTIK
89	Dedi Riyadin Saputro, M.I.Kom	FTIK/Dakwah
90	Ahmad Sahnan, M.Pd.I	
91	Ulpah Maspupah, M.Pd.I	FTIK
92	Abdul Chaqil Harimi, M.Pd.I	FTIK
93	Agus Husein As-Sabiq, M.Pd	FTIK
94	Muhammad Labib Syauqi, M.A	FUAH
95	Ubaidillah, M.E.I	FEBI
96	Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.	Syariah/TIPD
97	Ainul Yaqin, M.Sy.	Syariah
98	Sarmo, S.H.I., M.H.I	LPPM
99	M.Wildan Humaidi, S,H.I., M.H	Syariah
100	Abdul Basit, S.Th.I., M.H.I	Syariah

No	Nama	Fakultas
101	Moh. Toha, M.A	Pasca
102	Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I	Syariah
103	Mabarroh Azizah, M.H.	Syariah
104	Hasanuddin, B.Sc., M.Sy.	Syariah
105	Nurrohim, Lc., M.Hum	FUAH
106	Riris Eka Setiani, M.Pd.I	FTIK
107	Ubaidillah, M.A	FUAH
108	Sarpini, M.E.Sy	FEBI

3. Komposisi Butir Soal BTA-PPI

Adapun Komposisi Soal BTA-PPI adalah sebagai berikut :

a. Soal untuk materi BTA

1) Soal Hafalan Juz Amma (Nomor 1-30/30 Soal)

Jenis-jenis soal yang dibuat adalah :

a) Apa bacaan sesudah ayat berikut (nomor soal no 1-7) 7 soal

(1) 3 soal level I (mudah)

(2) 2 level soal II(sedang)

(3) 2 soal level III (sulit)

b) Apa bacaan sebelum ayat berikut (nomor soal no 8-15) 8 soal

(1) 3 soal level I (mudah)

(2) 3 soal level II (sedang)

(3) 2 soal level III (sulit)

c) Sempurnakan potongan ayat berikut (nomor 16-22) 7 soal

(1) 3 soal level I (mudah)

(2) 2 soal level II (sedang)

(3) 2 soal level III (sulit)

d) Lanjutkan potongan Ayat Bberikut (nomor 23-30) 8 soal

(1) 3 soal level I (mudah)

(2) 3 soal level II (sedang)

(3) 2 soal level III (sulit)

2) Soal Tajwid (Nomor 31-50/ 20 Soal)

Jenis soal yang dibuat untuk soal tajwid adalah :

- a) Soal Tajwid level I (mudah) (nomor 31-40) (10 Soal)
- b) Soal Tajwid level II (sedang) (nomor 41-46) (6 Soal)
- c) Soal Tajwid level III (sulit) (nomor 47-50) (4 Soal)

b. Soal untuk materi PPI (Nomor 51-100/ 50 Soal)

Soal-soal yang dibuat untuk materi PPI terdiri dari komposisi sebagai berikut :

- 1) Soal Bab Thoharoh (nomor 50-58) (8 soal)
- 2) Soal Bab Sholat (nomor 59-68) (10 soal)
- 3) Soal Bab Jenazah dan Perawatannya (nomor 69-76) (8 soal)
- 4) Bab Puasa (nomor 77-84) (8 soal)
- 5) Bab Zakat (nomor 85 -92) (8 soal)
- 6) Bab Haji dan Umroh (nomor 93-100) (8 soal)

4. Rincian Soal BTA-PPI Berdasarkan Persentase dan Jumlah

Ujian BTA-PPI ini terdiri dari soal tulis dan soal lisan. Maka kisi-kisi yang dibuat juga untuk kedua jenis soal ini.

Tabel 7

Rincian Soal BTA-PPI Berdasarkan Persentase dan Jumlah

NO	Jenis	Persen	Jumlah
1	Soal hafalan mudah (level 1)	24 %	12 butir
2	Soal sedang (level 2)	20 %	10 butir
3	Soal sulit (level 3)	16 %	8 butir
4	Soal tajwid level I	20 %	10 butir
5	Soal tajwid level II	12 %	6 butir
6	Soal tajwid level III	8 %	4 butir
Total Soal Tulis BTA		100 %	50 butir

5. Kisi-Kisi Soal

Adapun kisi –kisi dalam menyusun soal BTA-PPI adalah :

Tabel 8
Kisi-Kisi Soal BTA PPI

No	Jenis Soal	Tujuan	Contoh
1	Soal hafalan Juz Amma Level I	Menguji kemampuan hafalan tingkat mudah yaitu mulai surat Ad Dluhaa, dan An Naas	Pilihlah lanjutan ayat ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین ولا أنتم عابدون ما عبدتم لنا أعمالنا ولكم اعمالکم
2	Soal hafalan Juz Amma Level II	Menguji kemampuan hafalan tingkat sedang yaitu mulai surat al Buruuj s.d al-Laiil	apa قد افلح من تزکی lanjutan ayat berikut.... وقد خاب من دسها وذكرسم ربه فصلی ووجدك ضالا فهدی والليل إذا سجي
3	Soal hafalan Juz Amma Level III	Menguji kemampuan hafalan tingkat sulit yaitu mulai surat an Naaa s.d al Insyiqoq	sebutkan وشاهد و مشهود lanjutan ayat berikut قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود وماهم عنها بغافلین وما أرسل عليهم حافظین
4	Soal tajwid level I	Menguji pengetahuan tajwid level rendah yaitu materi hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, bacaan Qolqolah, bacaan tarqiq dan tafkhim, Ghunnah, al	termasuk bacaan ومن آیاته apakah lafadz ini ? a. Idghom b. Ikhfa c. Iqlab d. Idzhar

No	Jenis Soal	Tujuan	Contoh
		Ta'rif	
5	Soal tajwid level II	Menguji pengetahuan tajwid level sedang Idhghom, mad Thabi'I, mad badal, mad 'arid lissukun, mad iwad	Manakah yang termasuk bacaan mad badal.... a. إيماناً b. دائماً c. قياسياً d. سليم
6	Soal tajwid level III	Menguji pengetahuan tajwid level tinggi mad jaiz munfashil, mad wajib muttasil, mad silah, mad tamkin, mad lazim mustaqol kilmi, mad lazim harfi musyba', waqof, ghooribul qurban	ولا الضالين Bacaan termasuk bacaan a. Mad thobi'i b. Mad wajib muttasil c. Mad jaiz munfashil d. Mad lazim mutsaqol kilmi
7	Soal Bab Thoharoh	Menguji kemampuan tentang jenis air, najis, ketentuan tayammum, wudhu, mandi	Berikut ini termasuk air mutlak , kecuali..... a. Air hujan b. Air laut c. Air es d. Air es teh
8	Soal Bab Sholat	Menguji kemampuan tentang ketentuan shalat wajib, shalat sunnah, jamak dan qashar	Berapakah ruku' dalam shalat gerhana..... a. 3 b. 4 c. 2 d. 6
9	Soal Bab Jenazah dan	Menguji kemampuan tentang ketentuan	Doa setelah takbir yang ketiga dalam shalat

No	Jenis Soal	Tujuan	Contoh
	perawatannya	memandikan, mengkafani, mensholati, menguburkan	jenazah untuk satu orang laki-laki adalah..... a. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه b. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها c. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم d. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما
10	Bab Puasa	Menguji kemampuan tentang syarat, rukun, yang membatalkan, sunnah puasa dan ketentuan lain dalam puasa	Orang yang sudah tua renta atau pikun boleh tidak berpuasa, tidak wajib mengqodho tetapi wajib membayar fidyah, yaitu a. 8 ons b. 6 ons c. 7 ons d. 1 kg
11	Bab Zakat	Menguji kemampuan tentang mustahiq zakat, nishob zakat dan ketentuan lain dalam zakat	Berapa zakat yang harus dikeluarkan bagi petani yang panen 10 ton padi di sawah tadah hujan... a. 1 kwintal b. 1 ton c. 100 kg d. 1500 kg

No	Jenis Soal	Tujuan	Contoh
12	Bab Haji dan Umroh	Menguji kemampuan tentang syarat, rukun, wajib, sunnah, miqot, dan ketentuan lain dalam haji dan umroh	Orang yang pertama kali masuk mekah disunahkan thowaf, dinamakan apakah thowaf ini ? a. Thowaf qudum b. Thowaf wad' c. Thowaf sunnah d. Thowaf ifadloh

6. Validasi Soal

Validasi soal merupakan tahapan dimana setelah soal mentah sudah disusun dalam bentuk naskah dan sudah dilayout dan diedit dalam bentuk yang rapi lalu divalidasi kepada para pakar untuk dinilai apakah soal ini sudah layak untuk dijadikan sebagai alat uji atau tidak. Jika masih ada masukan dan revisi maka naskah soal akan diedit lagi sehingga dihasilkan alat test yang benar-benar valid untuk menguji kemampuan BTA-PPI peserta ujian.

7. Fiksasi Soal

Ini adalah tahapan terakhir sebelum naskah test benar-benar dijadikan sebagai alat test. Setelah soal divalidasi pakar dan sudah direvisi total maka soal baru dianggap layak untuk dijadikan alat test yang baik.

8. Evaluasi Soal

Evaluasi ini adalah penilaian atas seluruh proses yang dilakukan sejak naskah soal disusun sampai benar-benar telah diujikan kepada peserta ujian. Evaluasi dilakukan untuk memberikan masukan atas perbaikan secara keseluruhan terhadap proses penyusunan naskah soal BTA-PPI.⁸¹

⁸¹Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Test BTA-PPI IAIN Purwokerto* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018). Hal. 6-11.

Ma'had Al Jami'ah selain menjalankan program yang sudah menjadi tugas utama, Ma'had Al Jami'ah juga sebagai pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan kampus. Beberapa kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey pesantren mitra yang bertujuan untuk mengecek sarana prasarana, structural dan kegiatan pesantren pada awal terbentuknya pesantrenisasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Workshop model pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) di Hotel Rosenda Baturaden pada tahun 2010.
3. Workshop evaluasi standarisasi kemampuan BTA PPI yang dilaksanakan di salah satu Ponpes Mitra pada tahun 2010.
4. Membantu pondok pesantren supaya pondok ikut terbantu dalam pengadaan tempat.
5. Melaksanakan pertemuan seluruh pengasuh pesantren Mitra yang bertujuan untuk mengetahui realita pesantren mitra dan sharing kegiatan antar pesantren.
6. Mencetak modul BTA-PPI untuk santri baru setiap tahun.
7. Melaksanakan pertemuan seluruh pengasuh pesantren Mitra yang bertujuan untuk mengetahui realita pesantren mitra dan sharing kegiatan antar pesantren.⁸²
8. Membuat aplikasi SIMA (Sistem Informasi Ma'had Al-Jami'ah) yang dipandu Gus koko dari Ponpes Darussalam Dukuwaluh yang bertujuan untuk mengontrol data masuk keluarnya santri di pesantren mitra, profil pesantren, kurikulum, data ustadz dan ustadzah, kegiatan masing-masing pesantren dan informasi dari Ma'had pada tahun 2019.
9. Pelatihan Admin SIMA yang ditunjuk oleh pengasuh pesantren masing-masing pada tahun 2019.

⁸² Data Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Dr. Supani, M.A, Senin, 11 Mei 2020.

10. Mengadakan Expo Santri tahun 2019 yang diikuti oleh semua pesantren mitra kampus yang dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto dan di akhiri dengan kegiatan Ma'had Bersholawat yang dihadiri oleh Gus Azmi beserta rombongannya pada tahun 2019.
11. Mengadakan Lomba Muhafadzoh yang diikuti oleh pesantren mitra IAIN Purwokerto pada tahun 2019.
12. Memberikan bantuan berupa alat kesehatan ke ponpes mitra selama COVID 19 pada tahun 2020.
13. Melaksanakan Seminar Ma'had Al Jami'ah IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang bertema Eksistensi Pesantren di Era 4.0.⁸³

Tentunya dalam menjalankan program pesantrenisasi banyak tuntutan, dukungan dan tantangan dari berbagai macam pihak. Semangat menjalankan sebuah program akan terasa lebih manfaat jika lingkungan sekitar ikut mendukung seperti seluruh stakeholder IAIN Purwokerto, mahasiswa serta dukungan dari orang tua. Factor pendukungnya karena pesantrenisasi di pandang baik maka hampir secara terbuka tidak ada yang menolak sehingga program ini tidak ada hambatan karena teradapat kebijakan dan menjadi landasan dan di SK oleh Rektor. Namun tidak bisa dipungkiri factor penghambatnya sebuah kebijakan akan ada dan muncul. faktor penghambatnya adalah dari kalangan mahasiswa sendiri belum serius untuk mendalami agama. Niat dari individu masing-masing kurang tepat saat belajar di PTKIN, yang dituju hanya gelar aja tetapi belum memikirkan kualitas kepantasannya sebagai lulusan IAIN Purwokerto. Sebagai lulusan IAIN Purwokerto belum bisa membaca kitab, belum bisa membaca al qur'an dengan kaidah tajwid dan belum bisa terkait praktek pengamalan ibadahnya. Maka lulusan itu akan terasa kurang pantes jika dipandang di masyarakat nanti. Kesepahamannya belum menyeluruh menyadari hal yang seperti ini. Banyak mahasiswa merasakan keterpaksaan di pondok pesantren hanya karena harus lulus BTA/PPI, seandainya tidak diwajibkan maka mahasiswa tersebut tidak mukim di pondok. Mereka menganggap beban ketika

⁸³ Wawancara dengan Admin SIMA Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Siti Hanifatul Jannah.

belajar di pesantren. Proses efektifitas pembelajaran akan berkurang jika tidak ada totalitas dan tidak ada keihlasan seseorang untuk nyantri. Sehingga mereka melanggar peraturan pesantren, tidak taat dengan fatwa pengasuhnya. Selain hal itu, mahasiswa baru masuk ke pondok mereka harus kegiatan makrab, ekstra kampus, intra kampus sehingga waktunya berkurang untuk belajar di pesantren tetapi hal lain kampus juga ada pengembangan bahasa.⁸⁴

Tanggapan yang cukup baik karena banyak yang membantu, begitupun ada yang kurang karena pertimbangan ekonomi, dan ada yang tidak suka dengan pendidikan pesantren seperti tahlilan, wiridan, sholawatan. Ada orang yang memang tidak suka dan ada yang bilang tradisi-tradisi pesantren itu dibilang bid'ah khurofat sehingga disuruh mondok rasanya berat sekali karena menentang dirinya sendiri malah masuk dilembaga tersebut. Tapi jika tidak suka dengan hal itu maka ada alternative yaitu pesantren zam-zam (Muhammadiyah) yang telah mewadai hal itu.⁸⁵

Program psantrenisasi membawa dampak yang baik bagi mahasiswa sendiri terutama berimplikasi pada bidang akademik, diantaranya sertifikat kelulusannya menjadi syarat mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh jurusan dan sertifikat kelulusan juga menjadi syarat untuk mengikuti PPL, KKN, Ujian Komprehensif dan Munaqosyah. (SK Ketua STAIN Purwokerto No.287 tertanggal 31 Agustus 2011).

Semula pihak STAIN hanya memberikan tawaran kepada dosen dan pemilik pondok pesantren yang siap mengelola, tanpa memberikan janji atau kompensasi apapun. Bahkan sebelum itu, menurut Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag, masalah penanganan BTA/PPI pernah diserahkan kepada para takmir masjid dan organisasi ekstra seperti : HMI, PMII, IMM dan KAMMI. Tetapi karena kurang tertangani secara baik, akhirnya diserahkan kepada pondok pesantren.⁸⁶

⁸⁴ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib. M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

⁸⁵ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib. M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

⁸⁶ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib. M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

Beberapa factor tersebut akhirnya mendorong pimpinan baru STAIN, Dr. H. Lutfi Hamidi, M.Ag., untuk segera mewujudkan upaya peningkatan kompetensi dasar baca tulis Al-Qur'an dan pengetahuan pengamalan ibadah. Langkah awal yang dilakukan oleh Rektor (saat itu ketua) adalah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto No. 287 tertanggal 31 Agustus 2011, tentang Pedoman Martikulasi Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) serta Pengetahuan Pengamalan ibadah (PPI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Menurut Ketua STAIN /Rektor IAIN Purwokerto :

“Kami mewajibkan bagi mahasiswa yang tidak lulus (tes BTA/PPI) ini, minimal satu tahun tinggal di pesantren. Selama satu tahun di pesantren ditargetkan minimal kualitas kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an mereka sudah standar disamping memiliki basic pengetahuan keagamaan seperti pengetahuan tentang Al-Qur'an, ilmu Fiqh, Ilmu Kalam, dan pengetahuan agama lainnya yang diajarkan di pesantren.”(<http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=262381>. Diakses Agustus 2020)⁸⁷

Kebijakan program pesantrenisasi berjalan dengan lancar, karena memiliki implikasi akademik. *Pertama*, sertifikat kelulusannya menjadi syarat mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh jurusan. *Kedua*, sertifikat kelulusan juga menjadi syarat untuk mengikuti PPL, KKN, Ujian Komprehensif dan Munaqosyah.⁸⁸ Selain berdampak pada nilai akademik, pesantren sendiri dapat membawa positif bagi mahasiswa yang sudah ada niat untuk nyantri. Dengan mahasiswa ada di pesantren dapat menambah keilmuan, mendapatkan banyak pengetahuan yang belum pernah didapat sebelumnya, mendapatkan teman dari berbagai kota.⁸⁹

Dengan demikian adanya kerjasama IAIN Purwokerto dengan pondok pesantren, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyerap ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral sekaligus, karena tersedianya wadah berupa

⁸⁷ <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=262381>. Diakses Agustus 2020)

⁸⁸ Data Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Dr. Supani, M.A, Senin, 11 Mei 2020.

⁸⁹ Data Wawancara dengan Admin SIMA Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Siti Hanifatul Jannah.

iklim pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kedua aspek tersebut. Dari sisi keilmuan, akan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman, memperkuat sikap keagamaan, dan menambah ketrampilan dalam menjalankan ritual keagamaan. Sebab, selain ada kajian keilmuan, di pesantren juga erat dengan pembiasaan dan penanaman nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan yang ditradisikan dalam kehidupan di pesantren.⁹⁰

Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan pondok pesantren bagi mahasiswa merupakan sesuatu yang jarang ditemui di lembaga-lembaga pendidikan tinggi lain. Kebanyakan hanya melaksanakan langkah-langkah yang ada dalam teori ilmiah saja tanpa memberikan muatan berupa nilai-nilai spiritual keagamaan sebagai upaya dalam nilai-nilai karakter.

“Pesantrenisasi bukan hanya mengejar kemampuan akademik, intelektual, akan tetapi mampu mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan pesantren lah yang diakui sebagai lembaga pendidikan adi luhur yang penuh kesederhanaan tetapi komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan yang sangat tinggi.” (Wawancara K.H. Dr. Muh. Roqib, M.Ag.)⁹¹

Harapan dengan adanya pesantrenisasi, dapat meningkatnya kualitas pembelajaran di pesantren akan berpengaruh terhadap keluran pesantren yang memiliki kualifikasi keilmuan keagamaan yang mumpuni untuk bekal berjuang di masyarakat, mahasiswa alumni pesantren yang telah memiliki kemampuan dasar keagamaan yang memadai akan terbantu dalam meningkatkan kualitas dirinya selama proses pembelajaran di IAIN (terutama dalam mata kuliah yang sumber rujukannya Al-Qur'an, hadist dan kitab kuning), dan alumni IAIN yang berbasis pesantren akan memiliki tradisi (kebiasaan) kepesantrenan seperti shalat berjama'ah, tadarus Alqur'an, berdzikir dan lain-lain.⁹²

Dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan bagi anak, hal yang terpenting adalah penguatan secara lahir maupun batin akan sesuatu yang bersifat religious, sebagai dasar pendidikan. Hal itu ditandai dengan pengenalan serta

⁹⁰ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib, M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

⁹¹ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib, M.Ag, Senin, 11 Mei 2020.

⁹² Data Wawancara dengan Mudzir Ma'had IAIN Purwokerto, K.H. Nasruddin, M.Pd.

pembelajaran al-Qur'an baik tulisan maupun bacaan. Hal ini diperkuat dengan keterangan Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk memperhatikan dan mempelajari al-Qur'an. Allah SWT juga menjelaskan posisi alqur'an dalam tataran kehidupan manusia adalah sebagai petunjuk dalam berbagai persoalan manusia baik aqidah, syariah, akhlaq dan berbagai persoalan lain.

Begitu sentralnya posisi alqur'an dalam agama Islam, maka alqur'an mendapat perhatian yang cukup besar dari umat Islam sepanjang sejarahnya. Tidak ada satu bacaan pun yang dibaca baik oleh orang yang mengerti artinya maupun tidak, selain bacaan alqur'an yang mulia ini. Tidak ada satu bacaan pun, selain alqur'an yang dipelajari, dibaca, dan dipelihara aneka macam bacaannya yang jumlahnya lebih dari sepuluh, serta ditetapkan tata cara membacanya, mana yang harus dipanjangkan atau dipendekkan, dipertebal ucapannya atau diperhalus, dimana tempat-tempat berhenti yang boleh, yang dianjurkan atau dilarang, bahkan sampai pada lagu dan irama yang diperkenankan dan yang tidak. Bahkan lebih jauh lagi sampai pada sikap dan etika membaca pun mempunyai aturan-aturan tersendiri

Selain mendidik anak, membaca alqur'an, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya mendidik anak menulis. Anak diharapkan memiliki kemampuan menulis (kitabah) dengan baik dan benar dengan cara imla' (dikte) atau setidaknya dengan cara menyalin (naskh) dari mushaf. Tetapi pada masa sekarang, kita lebih sering menjumpai banyak generasi muda Islam yang kurang fasih dalam membaca alqur'an bahkan menulis aksara alqur'an pun juga tidak bisa.

Maka atas dasar tersebut, dengan adanya program pesantrenisasi alumni perguruan tinggi agama harus menegetahui minimal bisa membaca, menulis alqur'an didalamnya ada hadist, pengetahuan peribadatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan garansi bahwa yang bersangkutan bisa sholat, bisa mengamalkan ajaran agama, hidup sederhana, musyawarah, mufakat, kepemimpinan dan pergaulan-pegaulan yang baik lainnya yang sudah ada dalam kehidupan pesantren.⁹³

⁹³ Data Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib. M.Ag, Senin, 11 Mei 2020

D. Analisis Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto

Proses penyusunan kebijakan pendidikan yang menerapkan prinsip interaktif, partisipatif dan fungsi manajemen dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap yang melibatkan beberapa pelaku pembuat kebijakan (tim manajemen) yang nantinya akan berdampak kepada penerima kebijakan dan tentunya oleh implementator. Oleh karena itu diperlakukan penyebarluasan informasi secara akurat agar pihak-pihak yang terlibat dalam memahami isi-isi dan program kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebelum tahap ini, persiapan yang dilakukan antara lain :

1. Perencanaan Kebijakan Program Pesantrenisasi

Perencanaan merupakan langkah pertama dalam setiap kegiatan. Perencanaan sebagai dasar dalam melaksanakan implementasi kebijakan program pesantrenisasi di IAIN Purwokerto. Hal-hal yang mendasari adanya kebijakan program pesantrenisasi terjadi. Program pesantrenisasi pertama kali dibentuk oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) yang diketuai oleh K.H. Dr. Moh.Roqib, M.Ag dan sekretarisnya yaitu Dr. Supani, M.A. Saat itu IAIN masih menjadi STAIN yang dipimpin oleh Dr. Lutfie Hamidi, M.Ag pada tahun 2011. Pada umumnya program pesantrenisasi ini bertujuan untuk membantu memperkaya wawasan keagamaan dan meningkatkan kualitas mahasiswa, dan secara khusus program ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dibidang keagamaan dan keilmuan,
- b. Memperluas jaringan kerjasama IAIN Purwokerto dengan pihak-pihak luar,
- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- d. Memperluas kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh wawasan keagamaan yang cukup.
- e. Membentuk karakter mahasiswa yang Islami dan religious.
- f. Meningkatkan pemberdayaan mahasiswa.

Tujuan di atas didukung dengan Hal-hal yang mendasari adanya program pesantrenisasi antara lain :

- a. Dilihat dari input IAIN Purwokerto 60% dari kalangan umum SMA/SMK sehingga kepentingan qur'an dan hadistnya belum terpenuhi.
- b. Penilaian masyarakat terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di suatu desa yang belum berani menjadi imam sholat dan pembacaan tahlil.
- c. Input yang dirasakan kurang terhadap standar BTA/ PPI.
- d. Keterbatasan sumber daya manusia

2. Pengorganisasian Kebijakan Program Pesantrenisasi

Pengorganisasian kebijakan program pesantrenisasi dilaksanakan untuk mempermudah melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Program pesantrenisasi ini dikelola oleh UPT Ma'had Al Jami'ah IAIN Purwokerto yang bekerja sama dengan pesantren mitra IAIN Purwokerto sebanyak 30 Pesantren. Ma'had Al-Jami'ah adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di IAIN Purwokerto, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah Periode 2019-2023. Struktur organisasi dan uraian tugas Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Adapun pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Rektor 1. Bentuk kegiatan yang dilakukan UPT Ma'had Al-Jami'ah diantaranya martikulasi Baca Tulis Al-qur'an- Praktik Pengamalan Ibadah (BTA-PPI) bagi mahasiswa. Dari data pernyataan staff pengurus Ma'had Al-Jami'ah memiliki Visi dan misi sejalan dengan Visi dan Misi IAIN Purwokerto itu sendiri. Dalam mewujudkan visi dan misi maka diperlukan suatu tindakan yang nyata yang berisi tujuan komitmen supaya lebih spesifik. UPT memiliki tujuan :

- a. Mengembangkan tradisi dan komunitas penelitian ilmu dan agama secara inklusif dan intregratif.
- b. Mengembangkan strategi pembelajaran perkuliahan yang humanis.

- c. Mencetak sarjana yang kokoh spriritual dan berahklak mulia serta memiliki disiplin keilmuan yang tinggi.
- d. Menyuarakan pesan-pesan Islam yang Rahmatan Lil –alamin.
- e. Mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian.
- f. Menjadikan Islam sebagai spririt peradaban bangsa.
- g. Menjadi perguruan tinggi kelas dunia yang unggul dan mandiri dengan system tata kelola yang baik.

3. Pelaksanaan Kebijakan Program Pesantrenisasi

Program pesantrenisasi merupakan program wajib bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian BTA-PPI pada saat ujian pertama masuk (*pre-test*) dan diuji lagi setelah mengikuti program (*post-test*). Dalam mempermudah menjalani program tersebut, pihak IAIN Purwokerto menyediakan beberapa pesantren mitra untuk ditinggal (*mondok*) oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program supaya dapat dibimbing langsung oleh pengasuh pesantren dan staff-staff bimbingan khusus Baca Tulis al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah (BTA-PPI).

Dasar hukum yang digunakan oleh Ma'had Al Jami'ah dalam pelaksanaan program pesantrenisasi yaitu :

- a. Instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor Dj.I/Dt.LIV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 tentang penyelenggaraan kampus Ma'had Jami'ah.
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 048 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis martikulasi kompetensi dasar Baca Tulis al-Qu'an (BTA) serta Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. MoU kerjasama IAIN Purwokerto dengan pondok pesantren mitra.

Sebagai lembaga ma'had yang berkontribusi terhadap program pesantrenisasi terdapat landasan kurikulum bagi pesantren mitra yang diperkuat dengan SK Rektor IAIN Purwokerto Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan di pondok pesantren mitra IAIN Purwokerto. Pedoman pengembangan kurikulum pesantren mitra merupakan

acuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di pesantren mitra meliputi materi tadzhib(fiqih), Modul BTA-PPI, Akhlaq , hafalan penuh juz 30. Selain materi tersebut pesantren mitra dapat menambah materi yang lain sesuai dengan kebutuhan pondok mitra tersebut .

4. Pengawasan Program Pesantrenisasi

Tahapan pengawasan yaitu mengevaluasi setiap tahapan dan hasil akhir , sehingga secara interaktif dimungkinkan segera dilakukan perbaikan apabila diperlukan. Tahapan evaluasi berbentuk penilaian kualitatif dari pengamatan program pesantrenisasi. Pada umumnya program pesantrenisasi bertujuan untuk membantu memperkaya wawasan keagamaan dan meningkatkan kualitas mahasiswa secara khusus pembinaan materi BTA-PPI. Evaluasi program pesantrenisasi dilakukan oleh Pimpinan Ma'had beserta staffnya untuk melaksanakan monitoring ke beberapa pondok pesantren mitra untuk mengecek keadaan pesantren tersebut dan memberikan support kepada mahasiswa supaya tetap semangat belajar di pesantren, melaksanakan pertemuan para pengasuh pesantren mitra yang bertujuan untuk mengetahui realita pesantren dan sharing kegiatan antar pesantren.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Program Pesantrenisasi di IAIN Purwokerto bertujuan untuk mempertahankan kualitas mahasiswa IAIN Purwokerto, ketika sudah terjun di masyarakat dapat mempertahankan eksistensi dari ciri khas IAIN Purwokerto sendiri yang tidak meninggalkan keilmuan bidang agama yang bersumber dari alqur'an dan hadist. Program pesantrenisasi merupakan program wajib bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian BTA-PPI pada saat ujian pertama masuk (*pre-test*) dan diuji lagi setelah mengikuti program (*post-test*). Dalam mempermudah menjalani program tersebut, pihak IAIN Purwokerto menyediakan beberapa pesantren mitra untuk ditinggal (*mondok*) selama 1 tahun supaya dapat dibimbing langsung oleh pengasuh pesantren dan staff-staff bimbingan khusus Baca Tulis al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah (BTA-PPI). Kebijakan program pesantrenisasi memiliki implikasi akademik. *Pertama*, sertifikat kelulusannya menjadi syarat mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh jurusan. *Kedua*, sertifikat kelulusan juga menjadi syarat untuk mengikuti PPL, KKN, Ujian Komprehensif dan Munaqosyah dan pesantren sendiri dapat membawa positif bagi mahasiswa karean dapat menambah keilmuan, mendapatkan banyak pengetahuan yang belum pernah didapat sebelumnya. Kebijakan program pesantrenisasi dihubungkan dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Perencanaan program pesantrenisasi didasari dengan merumuskan terjadinya program pesantrenisasi yaitu input IAIN Purwokerto 60% dari kalangan umum SMA/SMK sehingga kepentingan qur'an dan hadistnya belum terpenuhi, Penilaian masyarakat terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di suatu desa yang belum berani menjadi imam sholat dan pembacaan tahlil, Input yang dirasakan kurang terhadap standar BTA/ PPI dan keterbatasan sumber daya manusia.

Pengorganisasian program pesantrenisasi dikelola oleh UPT Ma'had Al Jami'ah IAIN Purwokerto yang bekerja sama dengan pesantren mitra IAIN Purwokerto sebanyak 30 Pesantren yang telah melakukan MoU. Ma'had Al-Jami'ah adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di IAIN Purwokerto, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah Periode 2019-2023.

Pelaksanaan program pesantrenisasi Program pesantrenisasi merupakan program wajib bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian BTA-PPI pada saat ujian pertama masuk (*pre-test*) dan diuji lagi setelah mengikuti program (*post-test*). Dalam mempermudah menjalani program tersebut, pihak IAIN Purwokerto menyediakan beberapa pesantren mitra untuk ditinggal (*mondok*) oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program supaya dapat dibimbing langsung oleh pengasuh pesantren dan staff-staff bimbingan khusus Baca Tulis al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah (BTA-PPI). Selain mahasiswa dibimbing materi BTA-PPI, mahasiswa juga akan mendapatkan keilmuan yang menjadi tradisi di pesantren seperti sholat jamaah, pengajian kitab kuning dan kegiatan lain yang ada di pesantren.

Pengawasan program pesantrenisasi dilakukan oleh Pimpinan Ma'had beserta staffnya untuk melaksanakan monitoring ke beberapa pondok pesantren mitra untuk mengecek keadaan pesantren tersebut dan memberikan support kepada mahasiswa supaya tetap semangat belajar di pesantren, melaksanakan pertemuan para pengasuh pesantren mitra yang bertujuan untuk mengetahui realita pesantren dan sharing kegiatan antar pesantren.

B. Saran

Dalam melaksanakan program pesantrenisasi, ma'had al jamiah sebagai fasilitas dari pesantren mitra untuk lebih ditingkatkan lagi perannya terhadap pesantren mitra sehingga pesantren mitra tidak hanya focus dalam BTA-PPI saja melainkan kegiatan-kegiatan yang lain supaya mahasiswa yang akan mukim di pesantren mitra tersebut mempunyai semangat tinggi. Seperti halnya yang telah

diungkapkan oleh Rektor IAIN Purwokerto bahwa mudzir ma'had dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang lebih inovasi , tidak hanya sekedar penguasaan Standar BTA-PPI seperti penguatan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris, penguatan kajian kitab-kitab turost sehingga keilmuan mereka dapat menguasai dan membaca kitab-kitab kuning.



DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah Faridah, *Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Aspirasi Vol 2 No 1 Juni 2011.
- Arif Rifa'I Andi, *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Suistanable Vol. 1 No. 1 2018.
- Arwildayanto, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*, Bandung: Cendekia Press, 2018.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group 2009.
- Chandra Sari Supriatini, *Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banyumas*, Tesis, IAIN Purwokerto, 2017.
- Data diperoleh dari wawancara dengan Admin Ma'had IAIN Purwokerto , Lutfie Muamar Selasa, 25 Februari 2020.
- Data diperoleh dari wawancara dengan bapak Kassubag Administrasi Akademik , Fatkhurrozi,. Selasa, 25 Februari 2020.
- Data diperoleh dari wawancara dengan staff ma'had IAIN Purwokerto, Lutfie Mu'amar, Senin, 13 Juli 2020.
- Data Dokumentasi berupa Video dari LPM IAIN Purwokerto, 20 September 2019
- Data Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Supani, Jum'at, 15 Mei 2020.
- Data Wawancara dengan Pimpinan Ma'had IAIN Purwokerto , KH. Nasruddin, Jum'at, 1 Oktober 2019
- Elbadiansyah dan Dzakir, *Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan : Dari Manajemen Kelembagaan Hingga Konstruksi Kurikulum Interrelasi*, Muaddib Vol.07 No.01 Januari –Juli 2017.
- Fadhli Muhammad, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Tadbir :Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No.02, 2017.
- Faisal Amir Mohammad, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi* Jakarta :Mitra Media Wacana, 2016.

- Feiby Ismail Mardan Umar, , *Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam* (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming dan Joseph Juran), Jurnal Pendidikan Islam Iqra' Vol. 11 No. 2 ,2017.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta :Penerbit Salemba Humanika, 2010.
- Herman, *Sejarah Pesantren di Indonesia*, Jurnal Al-Ta'dib Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2013.
- Hizbul Muflihah Muh, *Administrasi Pendidikan Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru dan Pimpinan Sekolah* .Yogyakarta :Pilar Media, 2013.
- Irfan Murtadho Yusuf Ali Roziqin, , Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi : Studi Kasus di Universitas Diponegoro, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 8 No.2 , Desember 2019.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya: 2014.
- Junaidi Kholid, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia* (Suatu Kajian Sistem Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo), ISTAWA : Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2, No 1, Juli- Desember 2016.
- Juniar Dewantara Yusuf , *Evaluasi Kebijakan Program Pendidikan Inklusi di SDN Betet Kota Kediri*, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol 8 No.1 , Juni 2020.
- Majid Abdul, Analisis Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta:Samudra Biru, 2018.
- Mu'alimin,, *Menjadi Sekolah Unggul*. Yogyakarta : Ganding Pustaka, 2014.
- Mubin Ali, *Refleksi Pendidikan Filsafat Idealisme* , Rausyan Fikr Vol 15, Nomor 2 September 2019.
- Muhadjir Noeng, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Muslim, *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal Wahana , Vol 1, No. 10, 2015/2016.
- Muzayanah Umi, Manajemen Madrasah sebagai Media Strategis Pendidikan Karakter, Jurnal Analisis Ilmu Sosial dan Agama, Vol.12 No.2, 2014.
- Novia Rosydiana Wildan, Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Hizbul Wathan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Banyumas, Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016.

- Nurfuadi Moh. Roqib, , *Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru Yang Sehat Di Masa Depan*, Purwokerto: STAIN PRESS, 2011.
- P. Tampubulon Daulat, *Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke- 21* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Priatna Amin, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia”, Pasca Sarjana UNJ, 2008.
- Qoimah, *Menbangun Pelayanan Publik Yang Prima : Strategi Manajemen Humas Dalam Penyampaian Program Unggulan di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Islamic Management, Vol :01/No: 02.
- Rabiah Siti, *Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Sinar Manajemen, Vol 6, No: 1 2019.
- Riant Nugroho & H.A.R. Tilaar *Kebijakan Pendidikan : Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Roqib Moh., *Rencana Strategis IAIN Purwokerto Tahun 2020-2024*, Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019.
- Saha Ghafur Hanief, , *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia Suatu Analisis Kebijakan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.
- Sahidi Arian, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto)*, Tesis UIN Malang, 2016.
- Saifuddin Ahmad, *Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 03 No. 01, Mei 2015.
- Soeryanto Soegoto Eddy, *Menciptakan Strategi Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi* , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* , Bandung :Alfabeta, 2013.
- Sumber : <http://sima.iainpurwokerto.ac.id/datapesantren.php>
- Syafe’I Imam , *Pondok Pesantren : Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter* , Al- Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, Mei 2017.
- Terry G.R., *Principles of Management* (6th ed), London: Richard D.Irwin Inc, t.th.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Di Pondok Pesantren Mitra Dengan IAIN Purwokerto* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Test BTA-PPI Purwokerto*: IAIN Purwokerto, 2018.

Tim Visimedia, *UU Nomor 20 Tahun 2003 & UU No. 14 th 2005*, Jakarta Visimedia, 2008.

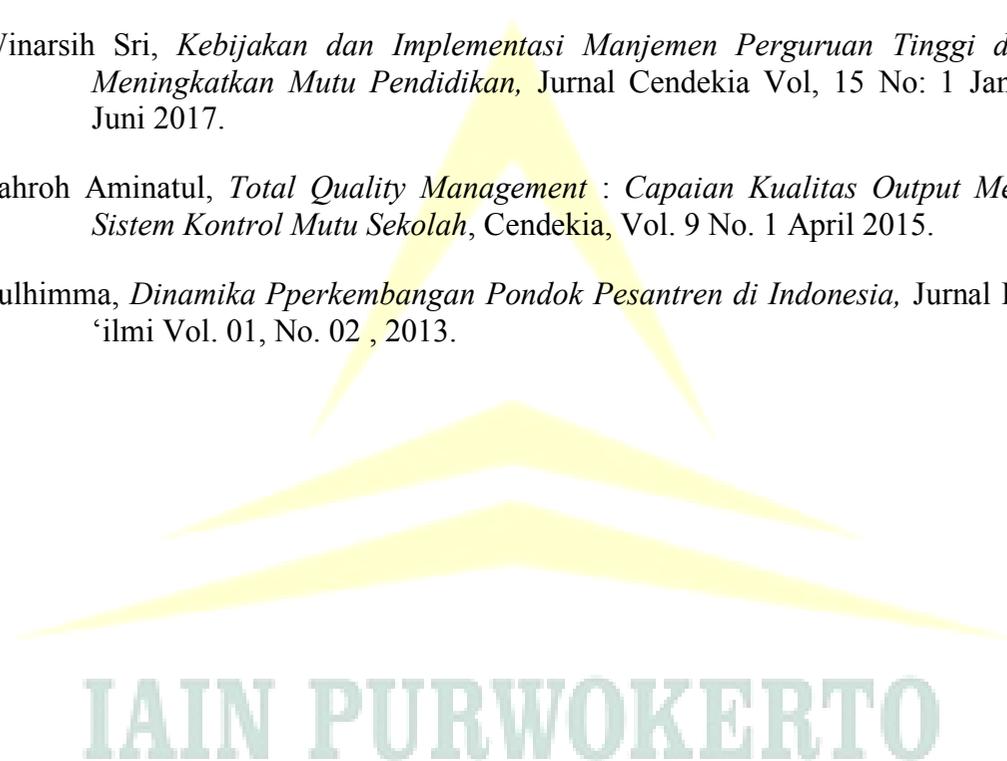
Toha Makhsun & Samsudin Salim, *Manajemen Pesantren Mahasiswa (Studi Kasus Manajemen Pesantren Aji Mhasiswa Al Muhsin Yogyakarta, Al Fikr Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam Vol 1 No 2 Agustus 2018*.

Wawancara dengan Rektor IAIN Purwokerto, K.H. Dr. Muh. Roqib, M.A, Selasa 11 Mei 2020.

Winarsih Sri, *Kebijakan dan Implementasi Manjemen Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Cendekia Vol, 15 No: 1 Januari-Juni 2017.

Zahroh Aminatul, *Total Quality Management : Capaian Kualitas Output Melalui Sistem Kontrol Mutu Sekolah*, Cendekia, Vol. 9 No. 1 April 2015.

Zulhimma, *Dinamika Pperkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, Jurnal Darul ‘ilmi Vol. 01, No. 02 , 2013.



IAIN PURWOKERTO